

# **PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA TIDAK SEMATA-MATA BERTUMPU PADA DAYA SAING**

Hutabarat, Budiman F.

## **PENDAHULUAN**

Kita saat ini telah berada dalam masa "indikator kinerja dan pemeringkatan". Pemeringkatan daya saing dan prospek pertumbuhan ekonomi berbagai Negara dan faktor-faktor pembentuknya telah menjadi agenda dalam hampir lebih dari 25 tahun ini. Hal ini dilakukan tentu berkaitan dengan proses kesejagatan ekonomi yang melanda dunia saat ini. Banyak lembaga tingkat dunia sangat rajin untuk membangun berbagai macam indeks yang menggambarkan keadaan atau kinerja suatu negara yang kemudian diterbitkan secara terbuka. Meskipun indeks-indeks ini mengandung banyak kelemahan, tetapi tetap saja lembaga-lembaga ini menerbitkannya seolah-olah tidak cacat sama sekali dan bahkan beberapa ahli ekonomi, lembaga konsultan ekonomi dan para eksekutif perusahaan berlomba-lomba memanfaatkannya untuk membuat analisis dan merancang saran dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk seolah-olah memperbaiki dan meningkatkan indikator kinerja dan peringkat daya saing suatu negara.

Masyarakat bisnis menggunakan pemeringkatan sebagai alat untuk menentukan rencana investasi dan menilai kelayakan letak usaha yang baru. Pemerintah yang berkepentingan menarik investor memanfaatkannya untuk memperbandingkan kebijakannya terhadap Negara lain. Pemeringkatan yang banyak dikenal para eksekutif bisnis dan pembuat kebijakan antara lain diterbitkan Forum Ekonomi Sejahter atau *the World Economic Forum (WEF)* dengan Indeks Daya saing Sejahter (IDS)nya atau *the Global Competitiveness Index (GCI)*, Lembaga Internasional untuk Pembangunan Manajemen (LPM) atau *the International Institute for Management Development (IMD)* dengan Indeks IMDnya, Lembaga Fraser atau *the Fraser Institute* dengan Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia (KED-LF)nya atau *Fraser Institute's Economic Freedom of the World index (EFW-FI index)*, dan Yayasan Heritage atau *the Heritage Foundation* dengan Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia-Yayasan Heritage (KED-YH)nya atau *Heritage Foundation's Economic Freedom of the World index (EFW-HF index)* dan masih banyak lagi yang lain.

Dapat dibayangkan bagaimana mendalamnya dampak suatu kebijakan yang didasarkan pada indeks-indeks ini. Misalnya, ambil contoh Indeks Daya saing Sejahter (IDS) yang memeringkat Negara-negara berdasar kemampuan persaingan mereka. Kalau suatu Negara digolongkan sebagai Negara dengan IDS yang rendah, lalu para pebisnis mempercayainya tentu Negara ini tidak akan dapat berkembang sesuai

dengan kemampuannya. Contoh lain, belum lama berselang, lembaga pemeringkat AS, *Standard & Poor's* menyatakan Argentina dalam status *default* (gagal bayar utang), sehingga sebuah kreditor perusahaan AS, yakni perusahaan pengelola dana (*hedge fund*) menolak merestrukturisasi utang Argentina dan selalu meminta bayaran penuh, termasuk semua bunga utang berdasarkan versi mereka sendiri (Harian *KOMPAS* 2014a). Kasus ini dibawa ke pengadilan distrik New York dan hakim memutuskan Argentina tidak boleh membayar bunga utang ke sejumlah kreditor lain, meskipun Argentina telah membayar sebagian cicilan utangnya beserta bunganya. Akibatnya, Argentina merasa dirugikan dan melakukan perlawanan. Padahal hampir semua Negara maju saat ini dan juga beberapa negara Asia yang berkembang pesat, ketika mereka masih berkembang tidak melaksanakan perdagangan bebas (dan kebijakan industri *laissez-faire* sebagai pasangan dalam negerinya). Namun, mereka merangsang pertumbuhan industri nasional mereka melalui tarif, subsidi dan kebijakan-kebijakan lain. Kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan Negara berkembang saat ini, banyak di antara Negara maju sesungguhnya melindungi industri mereka jauh lebih kuat saat itu (Chang 2003, Kumar dan Gallagher 2007). Sistem Perlindungan Industri Amerika yang dalam waktu kurang dari 100 tahun telah menghantar AS menjadi pusat kekuatan dunia. Sekarang semua itu tidak dibolehkan lagi dalam aturan OPD. Selain itu, sanksi lebih kuat terhadap pembajakan hak cipta intelektual juga dapat diterapkan melalui mekanisme Aspek Terkait-Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual/ATP-HKI atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*.

Setiap negara di dunia berusaha membangun dirinya dalam proses pembangunan. Artinya ia mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, antara lain dengan mengolah sumberdaya yang dimilikinya: alam, manusia, manajemen, teknologi dan lain sebagainya dan bahkan untuk memanfaatkan semua itu sehemat dan seefisien mungkin dengan tingkat kesejahteraan tertentu atau untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertinggi dengan memanfaatkan sumberdaya tertentu, termasuk di dalamnya untuk melakukan perdagangan dan peminjaman modal dan melakukan investasi. Dalam konteks kekinian, negara berkembang sedang berupaya menaiki tangga kinerja ekonomi, baku kehidupan, kelestarian dan persamaan yang membedakan mereka dari Negara maju. Dalam Laporan Pembangunan Manusia/LPM atau *Human Development Report (HDR)*, Program Pembangunan PBB/PP-PBB membatasi pembangunan manusia sebagai:

*"the expansion of people's freedoms and capabilities to lead lives that they value and have reason to value. It is about expanding choices. Freedoms and capabilities are a more expansive notion than basic needs."*

Dengan kata lain, populasi di Negara berkembang berjuang menaiki tangga pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencari peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih baik. Kemudian, dengan isu kelestarian, dimensi konsep pembangunan. Program Pembangunan PBB/PP-PBB bertambah dengan membatasi pembangunan manusia yang lestari:

*"the expansion of substantive freedoms of people today while making reasonable efforts to avoid seriously compromising those of future generations."*

Kita tahu bahwa pembangunan itu suatu kemungkinan, tetapi tidak dengan sendirinya. Kita telah memiliki pengalaman yang sangat kaya. Jelas, tidak ada suatu rumuspun untuk keberhasilan; kalau ada, akan ada lebih banyak lagi kesuksesan (Hoff dan Stiglitz 1999). Beberapa strategi tampaknya jalan beberapa saat, dan kemudian mandek<sup>1</sup>; beberapa strategi lancar di beberapa Negara, tetapi di Negara-negara lain tidak. Teori ekonomi berkembang untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan itu. Kekuatan apa yang dapat menjelaskan perbedaan pendapatan di berbagai Negara? Campurtangan apa yang lebih mungkin untuk merangsang pembangunan?

Pada model persaingan klasik, andaian persaingan sempurna, informasi sempurna, penerapan kontrak sempurna, dan pasar dan kontrak lengkap tidak boleh diabaikan (Arrow and Debreu 1954 dalam Hoff dan Stiglitz 1999), meskipun tiga gugus terakhir tidak disebut-sebut. Di bangku kuliah kita diberitahu bahwa model neoklasik adalah "hanya sebuah acuan" – suatu alat untuk berfikir melalui masalah yang rumit – tetapi sekarang pengenalan kita semakin berkembang bahwa implikasinya dalam keadaan nyata mungkin menyesatkan, di mana eksternalitas begitu meluas.

Ekonomi pasar tidak secara alami membuat pilihan yang tepat. Suatu ekonomi dapat terjebak dalam suatu keseimbangan tidak efisien dalam hal jenis kegiatan yang ditekuninya (alokasi sumberdaya antara penelitian dan pengembangan dan produksi, atau antara sektor mutakhir dan tradisional), gugus kelembagaan yang ia bentuk (misalnya lembaga asuransi, rangsangan kontrak, dan mekanisme pengawasan), dan tingkat faktor (tenaga kerja terampil). Ganjaran bagi perilaku tertentu di dalam ekonomi tergantung pada perilaku yang lain-lain, sehingga mungkin keseimbangan ganda, diperingkat Pareto adalah sintas. Jadi bila semua orang mengubah perilaku mereka serempak, mereka dapat beranjak ke keseimbangan yang lebih baik, tetapi tidak perlu sintas mekanisme yang membuat koordinasi tersebut. Pasar – yang mengarahkan jalan ke alokasi yang efisien – tidak pernah tuntas dalam dunia nyata dan tidak perlu ada kekuatan yang mengarahkan suatu ekonomi untuk mencari gugus efisien dari perilaku bagi semua pelaku.

Isu pokok yang menjadi keprihatinan bagi Indonesia yang masih bergulat dalam menaiki tangga pembangunannya adalah bahwa konsep daya saing ini semakin ditekankan kepada kemampuan Negara kita ini untuk mengikuti arus liberalisasi dan perdagangan yang bebas hambatan, yang cenderung membatasi peranan pemerintah. Ini membawa desakan persaingan terhadap pasar dalam negeri di negara-negara di seluruh dunia juga pada saat yang sama, penguatan aturan dan peraturan sistem perdagangan internasional. Padahal konstitusi mengamanatkan bahwa Negara atau pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyejahterakan rakyat/pemegang sahamnya dan tidak boleh bangkrut, sebagaimana suatu perusahaan yang dapat saja bangkrut karena tidak mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang untuk dibagikan bagi pemegang sahamnya. Tulisan ini dimaksudkan sebagai suatu tinjauan kritis terhadap konsepsi daya saing dan penelaahan terhadap kaitan daya saing dengan kinerja perdagangan pertanian.

Bagian ke dua tulisan ini memberikan ringkasan tentang keadaan pertanian secara singkat sektor pertanian Indonesia masa kini. Bagian ke tiga membahas

tentang konsep daya saing dan peran pertanian dalam pembangunan ekonomi, diikuti bagian ke dua yang membahas letak, Bagian ke empat menguraikan tentang keterbatasan konsep daya saing untuk digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan dan perdagangan pertanian dan dilanjutkan dengan uraian tentang peranan daya saing dalam menggerakkan ekonomi dan peranan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan daya saing, di ikuti bagian ke lima yang membahas tentang kekuatan inovasi penelitian dalam mendorong pembangunan. Arah baru perdagangan pertanian yang diamanatkan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD), di mana Indonesia sebagai Negara berkembang dibahas di bagian enam dan ditutup di bagian tujuh berupa kesimpulan dan saran-saran kebijakan.

## **POSISI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN**

### **Lingkup PBBAT Tidak Berubah Banyak**

Meskipun Masyarakat Ekonomi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/PBBAT atau *Association of South-East Asian Nations/ASEAN* akan dilaksanakan tahun depan, tetapi arus perdagangan untuk berbagai komoditas tidak akan jauh berbeda dari keadaan saat ini, karena sejak tahun 2010 sudah banyak tarif yang dihapus; pertama oleh enam negara anggota ASEAN sudah menurunkan tarif hingga nol persen, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan Filipina pada tahun 2010 dan berikutnya Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2014.

Komoditas yang dikecualikan adalah tarif untuk beras. Namun, menurut Laporan Daya saing Kesejahteraan atau the Global Competitiveness Report 2013- 2014, peringkat daya saing Indonesia di kawasan PBBAT ada di urutan kelima, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Dengan keterbukaan pasar di wilayah PBBAT melalui penerapan pasar bebas, Indonesia akan menghadapi tantangan berat dan cenderung mengkhawatirkan. Nilai perdagangan Indonesia, baik dengan sesama maupun luar anggota PBBAT, masih kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Produk-produk yang dihasilkan negara-negara PBBAT, apalagi pertanian, relatif sama dan saling bersaing di dalam dan di luar wilayah PBBAT.

### **Impor Sapi Meningkat Terus**

Pada triwulan I-2014 yang lalu Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan impor sapi/SPI sebanyak 160.000 ekor dengan realisasi impor mendekati angka 50 persen dari perkiraan indikatif, yakni impor sapi bakalan sebanyak 60.000 ekor, sementara sapi siap potong sebanyak 12.000 ekor. Sedangkan pada triwulan II-2014 dikeluarkan SPI sebanyak 278.000 ekor dengan pembagian dari komposisi

perencanaan indikatif adalah 214.000 sapi bakalan dan 64.000 sapi siap potong. Data realisasi impornya belum tersedia saat ini.

### **Kebijakan Negara Mitra Semakin Restriktif**

Neraca perdagangan Indonesia Januari 2014 mencatat defisit 430 juta dollar AS. Pada Desember 2013, neraca perdagangan masih surplus 1,51 miliar dollar AS. Sepanjang tahun 2013 tercatat defisit neraca perdagangan 4,08 miliar dollar AS.

Organisasi Perdagangan Dunia/OPD mengumumkan temuan kebijakan restriktif di negara anggotanya tahun 2013. Ada 407 kebijakan restriktif pada tahun 2013, naik secara mencolok dari 308 kebijakan pada tahun 2012 (Harian *KOMPAS* 2014a). Akibat penerapan kebijakan restriktif itu, nilai perdagangan dunia yang hilang mencapai 240 miliar dollar AS. Indonesia salah satu negara yang kehilangan potensi pendapatan dari ekspor itu. Namun, nilainya masih dalam perhitungan pemerintah.

Kebijakan restriktif merupakan gangguan perdagangan yang diterapkan suatu negara untuk menghambat masuknya produk dari negara lain untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri terlebih dahulu dibandingkan kepentingan perdagangan dunia. Kebijakan ini diambil karena negara itu tidak memiliki peluang untuk menerapkan hambatan tarif. Biasanya kebijakan restriktif berwujud penetapan baku kesehatan dan persyaratan teknis tertentu sehingga produk tersebut sulit masuk ke suatu negara. Contoh penerapan kebijakan restriktif adalah ketentuan bongkar produk impor yang hanya bisa dilakukan di satu pelabuhan saja di suatu negara. Hampir semua negara menerapkan kebijakan restriktif untuk melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya.

### **Impor Gula Mentah Meningkat Terus**

Sepanjang 2013, impor gula mentah untuk diolah menjadi gula rafinasi sekitar 2,9 juta ton. Kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman pada tahun 2014 naik 7 persen dibandingkan kebutuhan tahun 2013 sebesar 3,1 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman pada semester I-2014 seperti yang direkomendasikan Kementerian Perindustrian, Indonesia mengimpor lagi gula mentah sebanyak 150.000 ton. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan SPI gula mentah sebanyak 800.000 ton untuk memenuhi kebutuhan industri pada periode Desember 2013 hingga Februari 2014 (Harian *KOMPAS* . 2014b).

## **KONSEP DAYA SAING DAN KESALAHAN KONSEPSI PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM EKONOMI ARUS UTAMA**

Istilah daya saing sekarang ini telah merupakan sebuah kata bertuah dan menarik perhatian, kompleks dan mengundang perdebatan dan bahkan banyak

disalah-gunakan juga. Namun, sebetulnya apakah yang dimaksud dengan daya saing itu? Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaknai oleh istilah ini dan bagaimana cara mengukurnya. Istilah ini hampir selalu dibatasi secara salah dan tak seorangpun pernah secara nyata dapat tepat mengukur daya saing nasional. Misalnya, Komisi Eropa dalam Laporan Daya saing Eropanya pada tahun 2012 bahkan tidak memberi batasan tentang daya saing itu. Yang lain membatasinya secara salah, misalnya Porter yang menyatakan konsep **daya saing** di tingkat nasional sama artinya dengan **produktivitas**. Kemudian Forum Ekonomi Sejagat/FES atau *the World Economic Forum/WEF* (Jenewa, Swiss) dalam Laporan Daya saing Sejagatnya, memberi pengertian bahwa daya saing adalah gugus kelembagaan, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu Negara, padahal daya saing tidak sama dengan produktivitas.

### **Konsep Daya saing**

Di dalam kamus, daya saing dibatasi sebagai kata bentukan, yang berasal dari "bersaing" atau dari "persaingan", yang mengundang lawan atau perjuangan. Namun, akar etimologik – Latinnya **cum petere** – memiliki pesan kerjasama yang luas: **cum** artinya "dengan" dan biasanya bergabung (barang atau orang; lawan kata artinya ada tetapi jarang; **petere** artinya "untuk menuju" (selain "untuk menanya"). Dengan perjalanan waktu, saat ini pengertian asli kerjasama yang luas akhirnya digantikan oleh nuansa bersaing.

Bahkan, saat ini istilah daya saing seperti jadi godaan dalam merespons kesejagatan. Kesejagatan telah menjadikan dunia sebagai arena dan pasar terbuka yang dalam perspektif kebersamaan ditafsir seolah hanya untuk bertarung dan saling mengalahkan. Padahal, sebenarnya kesejagatan juga membuka peluang "bersulang" atau berbagi dan saling bekerja sama atas dasar saling menguntungkan, kesederajatan, dan saling percaya. Kemudian, persepsi tentang konsep daya saing dibangun dan dikaitkan dengan perspektif ilmu ekonomi, padahal ilmu ekonomi sendiri termasuk dalam ilmu-ilmu sosial, sehingga seharusnya konsep daya saing tidak dapat dilepaskan dari aspek sosiologis. Selain itu, banyak ahli tidak menyadari bahwa ilmu ekonomi sendiri juga bertitik-tolak dari berbagai teori pendukungnya. Anakbab ini dimaksudkan untuk mengkaji-ulang konsep daya saing dari berbagai perspektif teori yang berbeda-beda dan tidak hanya dari sisi ilmu ekonomi.

Dalam perspektif Ekonomi mikro, di tingkat perusahaan, konsep daya saing lebih jelas karena dapat dihubungkan pada kemampuan perusahaan secara konsisten dan berkeuntungan dalam menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar terbuka dari sisi harga, mutu dan sebagainya (Martin 2004). Sebuah perusahaan harus memenuhi syarat tersebut jika perusahaan ingin tetap sintas di dalam bisnis, dan semakin kuat daya saingnya serta semakin tinggi daya saing perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain, maka lebih besarlah kemampuannya untuk memperoleh pangsa pasar. Sebaliknya, perusahaan yang berdaya saing rendah,

pangsa pasarnya akan menurun, dan pada akhirnya perusahaan ini akan bangkrut kalau tidak diberi bantuan atau perlindungan buatan.

Namun, dalam perspektif Ekonomi makro, konsep daya saing lebih tidak jelas dan mengundang banyak tanda tanya. Meskipun ada fakta bahwa peningkatan daya saing suatu negara atau wilayah sering dibuat sebagai suatu tujuan utama kebijakan ekonomi, banyak pihak mempertanyakan tentang apa maksud istilah ini dan apakah bijaksana untuk membicarakan daya saing pada tingkat ekonomi makro. Ketidak-adaan batasan yang dapat diterima semua pihak ini sendiri menjadi sumber penolakan terhadap konsep daya saing ekonomi makro; sehingga sangatlah berbahaya kalau kebijakan ekonomi didasarkan pada suatu konsep khayal yang sarat dengan tafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa pandangan tentang konsep daya saing ekonomi makro menurut para pendukungnya menyepakati bahwa (dalam Martin 2004).<sup>1</sup>

"Daya saing suatu bangsa adalah tingkat di mana Negara itu, dalam keadaan pasar bebas dan adil, dapat memproduksi barang-barang dan jasa yang lolos dalam uji daya saing dan pada saat yang sama mempertahankan dan memperluas pendapatan riil warga negaranya. Daya saing di tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas yang lebih baik dan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keluaran ke tingkat kegiatan yang lebih tinggi yang selanjutnya dapat membangkitkan tingkat upah riil yang tinggi. Daya saing terkait dengan baku hidup yang meningkat, kesempatan kerja berkembang, dan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kewajiban internasionalnya. Ia bukan hanya ukuran kemampuan suatu bangsa menjual ke luar negeri, dan mempertahankan keseimbangan perdagangan." (*The Report of the President's Commission on Competitiveness 1984*).

"Daya saing dapat dibatasi sebagai tingkat di mana Negara itu, di lingkungan keadaan pasar terbuka, dapat memproduksi barang-barang dan jasa yang lolos dalam uji daya saing dan pada saat yang sama mempertahankan dan memperluas pendapatan riil dalam negeri." (*OECD Programme on technology and the Economy 1992*).

"Suatu Negara dikatakan berdaya saing apabila penduduknya dapat menikmati baku hidup yang tinggi dan meningkat dan kesempatan kerjanya selalu tinggi terus menerus. Lebih tepat lagi, tingkat kegiatan ekonomi tidak menyebabkan neraca ekonomi eksternal yang tidak stabil atau tidak mempertaruhkan kesejahteraan generasi mendatang." (*European Competitiveness Report 2000*).

Di dalam literatur teori ekonomi, enam mazhab utama teori ekonomi: Teori Klasik; Teori Neoklasik; Teori Ekonomi Keynesian; Ekonomi Pembangunan; Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru - teori pertumbuhan endogen; Teori Perdagangan Baru

---

<sup>1</sup> Dalam kamus daya saing dibatasi sebagai kemampuan bersaing secara sukses dengan cara-cara tertentu sepanjang waktu. (Borozaan 2008). Pada saat yang sama, penting dicatat bahwa beragam jenis batasan daya saing nasional masih perlu dicari (lihat Aiginger (1998) untuk sebagian kecil contoh batasannya).

mempunyai implikasi, eksplisit atau implisit terhadap pengertian daya saing dalam kaitannya dengan nasional dan dalam beberapa kasus perusahaan.

A. Implikasi penting Teori Klasik adalah:

- Perbedaan teknologi antara bangsa-bangsa dan industri-industri memberi motivasi bagi perdagangan dunia.
- Keunggulan teknologi yakni produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi bukanlah jaminan bahwa suatu industri akan dapat berhasil dalam persaingan. Meskipun industri dalam negeri lebih unggul dalam teknologi daripada penghasil luar negeri, tetapi walau bagaimanapun ia akan sirna kalau ia tidak juga memiliki keunggulan komparatif.
- Meskipun upah industri di luar negeri lebih rendah daripada industri di dalam negeri, itu tidak berarti bahwa produksi dalam negeri akan gagal dalam perdagangan bebas. Upah lebih tinggi dapat dipertahankan pada industri di negara yang memiliki keunggulan komparatif di bidang teknologi. Ini dapat terjadi karena tenaga kerja tidak berpindah secara internasional dan akibatnya teori nilai tenaga kerja tidak berlaku untuk semua negara.

B. Implikasi Teori Neoklasik pada daya saing adalah:

- Peningkatan harga suatu barang akan meningkatkan harga faktor yang digunakan secara intensif dalam produksinya dan menurunkan harga faktor yang digunakan tidak intensif. Jadi, arus perdagangan bebas akan meningkatkan penerimaan riil faktor yang berlimpah suatu Negara dan menurunkan penerimaan riil faktor yang terbatas di Negara tersebut.
- Perdagangan bebas akan menyamakan harga-harga barang keluaran, dan pada akhirnya, harga-harga faktor produksi (modal dan tenaga kerja) juga akan sama antar negara (dalil penyamaan harga faktor). Atau lebih tegas lagi, ada kecenderungan harga-harga faktor bergerak bersama-sama jika perdagangan antar negara sedikitnya berdasar pada perbedaan-perbedaan kelimpahan faktor.
- Perubahan kelimpahan faktor produksi suatu Negara akan menyebabkan perubahan yang seimbang dalam produksi barang-barang yang secara intensif menggunakan faktor yang proporsinya meningkat. Jadi, peningkatan modal relatif terhadap tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan keluaran barang padat-modal (dalil Rybczynski).
- Semua Negara berperan dalam pemilahan tenaga kerja sejalan dengan proporsi faktor relatif mereka. Namun, apabila proporsi-proporsi faktor sama di semua Negara maka dasar untuk perdagangan tidak ada.
- Dalil penyamaan harga-harga berimplikasi pengerucutan penerimaan modal dan tenaga kerja.



- Dengan persaingan sempurna secara menyeluruh, pengertian daya saing sesungguhnya tidak relevan dalam jangka panjang.
- C. Implikasi Teori Ekonomi Keynesian pada daya saing:
- Pemerintah dapat melakukan campur-tangan dalam daur ekonomi dengan berhasil: dengan catatan saatnya harus tepat.
  - Andaian pasar tidak sempurna memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan wilayah.
  - Pengerucutan atau pengurangan kesenjangan wilayah dapat dicapai melalui penerapan kebijakan ekonomi.
  - Intensitas modal meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan.
- D. Implikasi Ekonomi Pembangunan pada daya saing:
- Wilayah “pusat” dengan keunggulan produktif awal lebih mungkin mempertahankan keunggulannya daripada wilayah pinggiran yang kurang produktif.
  - Penyamaan produktivitas antar wilayah-wilayah mungkin menjadi suatu proses yang lambat.
  - Kebijakan harus mempertimbangkan tahap pembangunan wilayah.
  - Kebijakan dibutuhkan untuk mendorong dampak penyebar-luasan, melalui Investasi Langsung Asing/ILA atau Foreign Direct Investment/FDI serta dana pembangunan.
- E. Implikasi Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru - teori pertumbuhan endogen pada daya saing:
- Perbedaan produktivitas dan pertumbuhan wilayah dapat disebabkan perbedaan teknologi dan modal manusia.
  - Perbaikan teknologi dan modal manusia merupakan penggerak pertumbuhan.
  - Perdagangan terbuka mungkin dapat mendukung pengembangan pertumbuhan dan teknologi.
  - Investasi litbang sangat penting.
  - Perbaikan modal insani melalui pendidikan dan pelatihan adalah kunci penting.
- F. Implikasi Teori Perdagangan Baru pada daya saing:
- Pengkhususan produksi diperlukan pada tingkat industri/cabang, untuk memungkinkan ekonomi skala eksternal.
  - Ukuran pasar dalam negeri sangat penting untuk mendapatkan ekonomi skala internal.

- Investasi di bidang tenaga kerja, sarana dan prasarana khusus, jejaring pemasok, dan teknologi setempat mendukung peningkatan ekonomi skala eksternal.

Namun, semua teori ekonomi ini dapat diperdebatkan dan seringkali sangat dipertanyakan. Berbeda dari apa yang dikatakan ahli ekonomi profesional, bahwa ilmu ekonomi bukanlah suatu ilmu. Semua teori ekonomi memiliki andaian-andaian politik dan etik yang berlaku, yang pembuktian salah tidaknya teori ini, tidak mungkin seperti kita lakukan pada teori fisika dan kimia. Inilah alasan mengapa sekolah ekonomi terus berkembang dengan lebih dari selusin dan dengan kekuatan serta kelemahannya masing-masing. Chang (2014) mencatat, untuk ekonomi pasar bebas saja paling sedikit ada tiga jenis, yaitu: klasik, neoklasik dan Austria.

Selain dari perspektif teori ekonomi, sesungguhnya pemahaman keunggulan atau daya saing suatu Negara/wilayah juga harus dilihat dari sisi beberapa perspektif pendukung yang dapat diperoleh dari luar ilmu ekonomi, seperti sosiologi atau ilmu-ilmu/teori lain, sehingga para peneliti dan cendekiawan tidak memberi saran kebijakan yang keliru tentang daya saing kepada pihak penentu kebijakan. Dari sekian banyak teori dan konsep yang ada, lima konsep yang memiliki kaitan jelas dengan daya saing antara lain adalah: Teori pertumbuhan perkotaan; Ekonomi kelembagaan "baru"; Ekonomi strategi bisnis; Ekonomi Schumpeterian/evolusioner. Berikut ini dijelaskan sedikit tentang teori-teori ini:

#### **A. Teori pertumbuhan perkotaan**

Menurut teori ini, yang menjadi tempat utama penciptaan dan pengumpulan kekayaan ekonomi wilayah adalah kota (sistem perkotaan), bukan ekonomi-makro nasional. Sistem perkotaan menciptakan penerimaan yang semakin meningkat di atas semua pertukaran pengetahuan yang saling mendukung di antara perusahaan dan pelaku ekonomi yang berbeda di dalam wilayah geografis. Keberadaan pengembangan perkotaan menekan biaya penelusuran dan meningkatkan peluang kejadian yang tidak diprakirakan sebelumnya dan yang memberikan peluang inovatif – yang disebut ekonomi perkotaan.

#### **B. Ekonomi kelembagaan "baru"**

Pengertian "biaya transaksi" atau "*transaction costs*" memberikan perspektif ekonomi-mikro yang sama sekali berbeda. Berbeda dari teori organisasi industri strukturalis, teori biaya transaksi menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat dijelaskan oleh ekonomi skala tetapi oleh biaya transaksi, yang mencakup biaya yang berkaitan dengan komunikasi, koordinasi dan pembuatan keputusan. Secara azasi organisasi besar dapat merasakan penghematan besar dalam biaya transaksi melalui kontrak yang panjang.

#### **C. Ekonomi strategi bisnis**

Salah satu yang mewakili ekonomi strategi bisnis adalah teori kluster Porter (1990) yang menyatakan bahwa agar berdaya saing, perusahaan harus secara terus menerus memperbaiki keefektifan pengelolaan kegiatannya dan pada saat yang sama

mengarahkan tujuan ke posisi unggul daripada posisi strategis yang biasa-biasa saja. Dikaitkan dengan perbaikan pengelolaan kegiatan ini, perhatian tertuju pada perilaku perusahaan lintasbangsa atau multibangsa dalam bentuk Investasi Langsung Asing/ILA atau foreign direct investment/FDI karena dua alasan yaitu pertama: untuk melayani pasar setempat dengan lebih baik yang disebut ILA Horizontal; dan kedua, untuk mendapatkan masukan yang berbiaya murah disebut juga ILA Vertikal.

#### **D. Ekonomi Schumpeterian/evolusioner**

Schumpeter (1911) menganalisis peran inovasi kewirausahaan dalam memperbaiki pertumbuhan, meskipun sebetulnya Smith memperhatikannya jauh-jauh hari. Berhadapan dengan persaingan dan keuntungan yang menurun, para wirausahawan didorong untuk melakukan inovasi teknis dan keuangan. Desakan kegiatan yang berasal dari inovasi itu membangkitkan (secara takberaturan) pertumbuhan ekonomi. Melalui proses gelombang "perombakan kreatif" inovasi yang menyentuh industri berbeda pada titik waktu berbeda – tercipta keuntungan wirausaha berbeda yang meluas di seluruh industri. Jadi inovasi wirausaha adalah kekuatan yang membuat ketidak-seimbangan menuju pembangunan jangka-panjang.

Dengan penekanan perubahan dan inovasi teknologis sebagai faktor pencetus pertumbuhan ekonomi evolusioner Schumpeterian, terbukalah ruang baru dan lebih luas bagi campur-tangan kebijakan pemerintah dibanding cakupan yang sangat terbatas yang diresepkan teori neoklasik. Kerangka Schumpeterian ini telah memberi ilham bagi bidang ekonomi evolusioner yang memandang inovasi sebagai pemunculan varietas baru dalam suatu proses coba-coba. Inovasi dan pembelajaran yang didukung keberagaman, perbedaan, keruwetan dan ketidakpastian (Lambooy 2002) sangat penting dalam ekonomi evolusioner yang menekankan peningkatan jenis struktur ekonomi yang tidak putus-putus – berlawanan dengan ekonomi arus utama yang hanya bekerja dengan satu fungsi produksi dan satu perusahaan yang mewakili.

Oleh karena itu, sampai saat ini tidak ada pendapat yang diterima bersama di antara ahli ekonomik tentang apa yang dimaksud dengan daya saing. Para ahli akan menjelaskan bahwa daya saing mencakup isu yang luas: dari aspek perilaku (daya saing sebagai suatu kecenderungan untuk menantang) ke tajuk ekonomi mikro khas (biasanya berkaitan dengan biaya produksi yang rendah atau keuntungan perusahaan yang tinggi, bersamaan dengan kemampuan inovasi wira-usahawan), ke pernyataan ekonomi makro (terutama dikaitkan ke pola nilai tukar riel). Jadi tidaklah meherankan bahwa istilah daya saing tidak muncul dalam kamus ekonomi (yang paling umum digunakan) atau di dalam daftar istilah buku teks terpopuler ekonomi mikro atau – makro sekalipun (Cellini dan Soci 2002).<sup>2</sup> Akibatnya, rangkaian batasan yang ada dalam literatur sampai saat ini masih membingungkan dan persuasif, yang membuktikan bahwa daya saing adalah konsep yang terhindar dari batasan. Daya

<sup>2</sup> Lihat Palgrave (1915 dalam Cellini dan Soci 2002), dan edisi berikutnya; Sills (1968 dalam Cellini dan Soci 2002); Greenwald (1982 dalam Cellini dan Soci 2002); Kuper and Kuper (1985 dalam Cellini dan Soci 2002); Pearce (1992 dalam Cellini dan Soci 2002). Diantara buku teks: Burda and Wyplosz (1993 dalam Cellini dan Soci 2002) untuk ekonomi makro, dan Pindyck and Rubinfeld (1995 dalam Cellini dan Soci 2002) untuk ekonomimikro.

saing bukanlah konsep "ya-atau-tidak", tetapi konsep yang sumir, dan kalau pun digunakan, harus selalu diimbui pernyataan "relatif-terhadap-apa". Selain itu, batasan daya saing yang tidak sumir, pasti membawa kepada pengukuran yang tidak jelas pula, sehingga gambaran penilaian kuantitatif yang ia berikan dalam perumusan kebijakan mengundang tanda-tanya besar.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, IDS misalnya memiliki kelemahan pada beberapa tingkatan: batasannya terlalu luas, pendekatannya bias dan metodologinya cacat, banyak ukuran kuantitatifnya tidak jelas, berlebihan atau salah (Lall 2001). Kelemahan landasan teori dan empiris ini, sesungguhnya mengurangi nilai indeks ini untuk digunakan dalam tujuan analitik dan kebijakan.

### **Kelemahan Konsep Daya saing**

Istilah daya saing sejatinya berakar dalam pemikiran darwinisme sosial. Teori ini berusaha mengekstrapolasi konsep-konsep biologi seleksi alam (*natural selection*) dan *survival of the fittest* ke dalam sosiologi dan politik. Faham ini kemudian melahirkan "ideologi kekuatan" yang sebelum Perang Dunia II memacu perlombaan senjata dan perkembangan kapitalisme sebagai upaya bangsa-bangsa untuk sintas dalam alam kebersamaan.

Konsep-konsep daya saing yang ada tidak mudah ditentukan; penjelasan konsep ini berbeda-beda dan kadangkala bertentangan. Turok (2004 dalam Borozaan 2008) menunjukkan alasan mengapa beberapa penyebabnya dan akibatnya dapat diukur, tetapi daya saing itu sendiri tidak. Telah ditunjukkan bahwa daya saing itu sulit, sumir dan dengan demikian membingungkan, yang memunculkan lebih banyak pertanyaan dari pada jawaban.

Menurut Porter (1990), apabila suatu Negara menciptakan lingkungan bisnis di mana timbul keadaan bisnis yang mendukung dan di mana Negara memberikan bantuan tertinggi bagi perusahaan yang berkiprah di pasar lokal dan sejagat, keadaan-keadaan ini memberikan keunggulan kompetitif bangsa itu. Namun, Krugman (1994) tidak sependapat dengan Porter (1990): "Gagasan bahwa kinerja kesejahteraan dan ekonomi suatu Negara tergantung pada keberhasilan pada pasar sejagat adalah suatu hipotesis dan tidak serta merta menggambarkan kebenaran. Selain itu, pandangan praktis dan empiris membuktikan hipotesis ini sama sekali salah". Krugman (1994) percaya bahwa bangsa-bangsa yang menonjol di dunia tidak bersaing satu sama lain dan tidak ada tanda-tanda persaingan nyata di antara mereka. Doktrin daya saing telah menarik massa yang percaya terhadapnya dan menjadi pengikut setianya. Pembahasan dan penulisan tentang daya saing telah menjadi mode di antara para cendekiawan, pebisnis dan pembuat keputusan. Para ekonom dan ahli-ahli di mana-mana telah mengangkat "daya saing" ke status hukum alamiah ekonomi kapitalis mutakhir. Penilaian daya saing suatu Negara dan perumusan kebijakan untuk meningkatkannya telah menjadi tugas melembaga yang resmi di beberapa Negara, seperti AS, Inggris Raya, Belgia, Italia, Belanda dan Jepang. Selain itu, berbagai organisasi swasta dan konsultansi yang berkepentingan dengan pengukuran dan

pelobian penentu daya saing telah bermunculan, seperti Forum Ekonomi Sejagat/FES, Lembaga Daya saing atau *the Competitiveness Institute* (Barcelona, Spanyol), Dewan Daya saing atau *the Council on Competitiveness* (Washington, DC, AS) dan Lembaga Strategi dan Daya saing atau *the Institute for Strategy and Competitiveness* (Harvard, MA, AS). Namun, sorotan terhadap daya saing bukan gejala ekonomi makro saja. Ia juga telah menarik perhatian di tingkat skala wilayah, perkotaan dan lokal. Meskipun demikian, konsep ini masih kabur dan belum memiliki kerangka teoritis dan empiris yang jelas. Di tingkat nasional, banyak yang tidak sepakat terhadap gagasan daya saing (Cellini and Soci, 2002; dan Krugman (1996 dalam Kitson *et al.* 2004) dan Krugman (1996), serta peneliti-peneliti lain (e.g. Group of Lisbon 1995 dalam Kitson *et al.* 2004). Namun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep daya saing itu sendiri sumir, tidak mudah ditentukan, khususnya dengan acuan untuk wilayah atau untuk suatu Negara. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing umumnya seringkali gagal mencapai sasarannya dan bahkan di Negara berkembang, konsep daya saing sering tidak tepat sasaran.

Persoalannya adalah, meskipun pengertian daya saing sangat bermakna bagi sebuah perusahaan, tetapi kalau konsep ini dibawa ke tingkat ekonomi nasional agregat: "daya saing adalah suatu kata yang tidak mempunyai arti apabila diterapkan untuk ekonomi nasional. Dorongan yang berasal dari daya saing salah dan berbahaya" (Krugman 1994). Cellini dan Soci (2002) menyarikan pemikiran Krugman dalam dua butir utama: (i) konsep daya saing nasional adalah khayalan karena Negara-negara tidak memiliki titik akhir, dan tidak seperti perusahaan, tidak bangkrut dan tidak peduli apakah mereka puas atau tidak dengan kinerja ekonominya; (ii) perdagangan internasional bukanlah permainan yang saling mengalahkan.

Karsa tentang keberuntungan ekonomi suatu Negara ditentukan kesuksesannya di pasar dunia adalah suatu hipotesis, bukan kebenaran yang seharusnya dan sebagai perihal praktis dan empiris hipotesis ini salah total (Krugman 1994). Jadi, memandang berbagai Negara bersaing satu sama lain untuk memperoleh pangsa pasar seolah-olah mereka berada dalam suatu pertarungan dunia yang di dalamnya hanya ada pemenang dan pecundang. Memang, tidak dapat disangkal bahwa daya saing penting. Dalam kehidupan ekonomi dan di luar itu, persaingan merupakan suatu sumber utama pengerahan tenaga dan dayacipta, tetapi persaingan yang berlebihan seperti difahami istilah sempit pasar yang harus berseberangan memiliki keterbatasan dan dampak negatif. Untuk itu perlu membedakan antara persaingan dan daya saing (Kitson *et al.* 2004).

Batasan-batasan daya saing seperti dikemukakan sebelumnya terpusat pada keluaran persaingan; yang diukur oleh ukuran efisiensi kuantitatif baku, misalnya oleh PDB per kepala – dalam hal lokalitas atau oleh pangsa pasar atau keuntungan - dalam hal perusahaan. Dengan ruang lingkup batasan seperti ini, daya saing diikat pada persaingan murni. Selain itu, ia berimplikasi pada kesintasan pemenang dan pecundang, yaitu pendatang yang terlambat di belakang (dalam hal lokalitas: suatu bangsa, wilayah atau anak-wilayah) dapat dikunci dalam kurungan jangka panjang yang dibentuk dari ketidak-unggulan daya saing.

Berdasarkan pandangan ini daerah-daerah miskin tidak mungkin dapat berdaya saing, padahal daya saing adalah istilah berdimensi ganda yang seharusnya dipertimbangkan sejalan dengan waktu. Seseorang sebaiknya mempertimbangkan potensi beberapa wilayah atau suatu organisasi untuk berkinerja baik dalam istilah ekonomi dan lainnya. Dengan pandangan yang terakhir ini ada tersirat dimensi waktu dan kepentingan strategis dari daya saing.

Menganggapnya itu hanya sebagai ukuran keefisienan kuantitatif sama sekali tidak tepat. Selanjutnya ia juga menekankan kebutuhan untuk mengarahkan peubah atau penggerak lunak untuk mengerti, mengukur dan meningkatkan kinerja dan pembangunan wilayah. Misalnya, apabila suatu wilayah atau organisasi mengembangkan sumberdaya dan kapasitas insaninya secara inovatif, ia dapat dipandang sebagai wilayah berdaya saing meskipun relatif miskin.

Paul Krugman, peraih Nobel bidang ilmu ekonomi 2008, pernah menyatakan daya saing sebagai gagasan yang berbahaya. Dalam satu artikelnya, "*Competitiveness: A Dangerous Obsession*" (1994), Krugman mengingatkan bahwa berfikir dalam istilah daya saing, langsung ataupun tidak langsung, akan membawa pada pemborosan, proteksionisme dan konflik, serta kebijakan pemerintah yang buruk (Vuković *et al.* 2012). Poot (2000 dalam Vuković *et al.* 2012) mendukung pendapat Krugman (1994) ini dan menunjukkan bahwa ada persaingan kuat di pasar bebas dan kesejagatan, tetapi hanya bagi perusahaan-perusahaan dan bukan di wilayah dan Negara. Artinya persaingan antar wilayah bukan permainan saling mengalahkan dengan satu-satunya pemenang. "Permainan persaingan" terutama berkaitan dengan tindakan terkait ekonomi, yang diambil untuk meningkatkan baku hidup lokalitas, wilayah atau Negara tertentu. Jadi Porter (2004 dalam Vuković *et al.* 2012) memegang hipotesis bahwa persaingan bukan permainan saling mengalahkan, karena banyak Negara dapat meningkatkan produktivitasnya: "Tantangan utama pembangunan ekonomi suatu Negara adalah membuat keadaan pertumbuhan produktivitas cepat dan lestari". Banyak penulis (Krugman 1994; Kern 2005; Ručinska and Ručinsky 2007 semuanya dalam Vuković *et al.* 2012), berpandangan bahwa daya saing antara perusahaan dan wilayah tidak dapat dibandingkan. Perusahaan dapat masuk dan keluar dari pasar tergantung atas keberhasilannya, tetapi wilayah atau Negara tidak dapat meninggalkan wilayahnya apakah ia berhasil atau tidak. Berdasarkan hal ini, perbedaan utama antara daya saing suatu perusahaan dan suatu wilayah atau Negara mungkin perlu ditekankan: Perusahaan bertarung satu sama lain dan dapat memperbaiki posisinya di pasar dengan mendesak ke luar perusahaan lain atau memperburuk posisi perusahaan lain<sup>3</sup>, tetapi wilayah atau Negara dapat memperbaiki posisinya secara bersamaan tanpa merugikan posisi wilayah atau Negara lain. Oleh karena itu Krugman (1994) berfikir bahwa pengertian daya saing tidak diperlukan sama sekali dan pengertian daya saing suatu bangsa atau wilayah tidak sesederhana daya saing perusahaan: "Daya saing bukanlah pernyataan yang mempunyai arti. Pendapat bahwa Negara-negara adalah sama dengan perusahaan dan bahwa mereka bersaing antar sesamanya di suatu pasar adalah suatu mimpi yang sempurna" (Maskell

<sup>3</sup> Dalam literature ekonomi, hipotesis ini disebut optimum Pareto.

and Eskelinen, 1998 dalam Vuković *et al.* 2012)<sup>4</sup>. Namun, meskipun wilayah atau Negara tidak memiliki ciri-ciri seperti perusahaan, tingkat persaingan tertentu antar mereka ada dan banyak penulis bermaksud untuk menguji bentuk dan ciri-cirinya. (Ručinska dan Ručinsky 2007 dalam Vuković *et al.* 2012). Poot (2000 dalam Vuković *et al.* 2012) menyebutkan bahwa daya saing suatu wilayah memberikan suatu ukuran potensinya dalam mencapai pertumbuhan taraf hidup lestari bagi semua penduduknya.

Beberapa upaya penelitian akhir-akhir ini yang menyoroti korelasi antara pemeringkatan Negara-negara dan pertumbuhan ekonomi mereka mendapatkan bahwa hubungan ini tidak ditemukan (Berger and Bristow 2009; Ochel and Röhn 2006). Berger dan Bristow (2009) menyimpulkan bahwa indeks-indeks itu tidak mempunyai pendekatan bersama dan merupakan penduga kinerja ekonomi buruk. Reinert (1995) yang menganalisis teori persaingan selama 500 tahun, mengamati bahwa kritik Krugman terhadap daya saing dan ekonomi neoklasik dapat dijelaskan dengan pemahaman bahwa daya saing tidak mempunyai arti jika diandaikan perusahaan yang mewakili dengan informasi sempurna dan tidak ada pengaruh skala sebagaimana dilakukan teori neoklasik pada umumnya. Gagasan daya saing dalam penguat pemikiran ini adalah bahwa Negara-negara meningkatkan baku hidup mereka melalui kegiatan bersaing dengan Negara lain. Ini bertentangan paling tidak dengan model neoklasik baku di mana teknologi produksi bersama dan pasar bersaing menggerakkan dunia ke arah suatu keseimbangan persaingan Pareto-optimal. Jelaslah, analisis yang ada tentang daya saing tidak menghasilkan banyak manfaat bagi analisis kebijakan, meskipun pembuat kebijakan terus menerus tertarik pada daya saing sebagai dasar dan alasan untuk melakukan perubahan kebijakan.

Fakta yang terjadi adalah peningkatan pemilahan tenaga kerja secara internasional yang semakin meningkat disertai dengan peningkatan kesenjangan pendapatan antara Negara-negara miskin dan kaya, dengan arus perdagangan di antara keduanya kecil sekali. Jadi, meskipun indikator-indikator komposit, seperti indeks daya saing mampu memadukan jumlah informasi yang sangat besar menjadi format yang mudah dimengerti dan bernilai sebagai alat komunikasi dan politik, di mana seseorang dapat memperbandingkan dan memeringkat Negara-negara dalam perkara daya saing industri, pembangunan lestari, kesejagatan dan inovasi, mereka mengidap banyak kesulitan metodologis yang berakibat mereka dapat menyesatkan dan mudah dimanipulasi.

Di dalam makalahnya, Freudenberg (2003) menguji indeks kinerja inovasi atau *innovation performance* negara-negara OECD dari sisi keterbatasan metodologinya termasuk penjelasan rinci gugus data pembentuknya, pilihan teknik pembakuan data dan metode pembobotan, penilaian terhadap keunggulannya dibandingkan dengan cara lain untuk menangani isu metodologi yang timbul pada pembentukannya. Ternyata, Freudenberg (2003) menemukan bahwa hambatan konseptual untuk indeks kinerja inovasi ini sangat berat: indikator yang tersedia umumnya mengukur masukan atau menggambarkan perubahan pada berbagai tahap berbeda proses inovasi,

<sup>4</sup> Diambil dari Ručinska dan Ručinsky (2007 dalam Vuković *et al.* 2012), halaman 904.

sementara yang menggambarkan keluaran atau sisi kinerja inovasinya terbatas. Selain itu, tepat tidaknya indikator-indikator yang tersedia sangat tidak dapat dipastikan, dan di beberapa kasus kesesuaiannya untuk tujuan perbandingan antar-negara mengundang pertanyaan.

Indeks seperti ini juga sangat peka terhadap keragaman pada metode pembakuan data dan pembobotan masing-masing indikator. Akibatnya, setiap upaya untuk memeringkat Negara-negara dengan basis indeks seperti ini atau memperlakukannya sebagai data untuk tujuan empiris sangat berbahaya, meskipun upaya kearah pemeringkatan beberapa Negara tampaknya kuat. Jadi, indeks seperti ini harus digunakan secara sangat hati-hati dalam suatu kegiatan analisis empiris atau kebijakan dan harus dibekali informasi dan analisis lain juga.

Persoalan adalah kalau indeks atau indikator komposit ini sampai dijadikan sebagai suatu patokan untuk kemudian melahirkan saran kebijakan. Dalam studi kasus tentang *the Doing Business indicators*, suatu acuan pengaturan yang dihasilkan kelompok karyawan Bank Dunia tampak bagaimana penciptaan, persebaran dan penggunaan indikator mempunyai pengaruh pada peraturan (Niemann 2013). Pada proses perumusan acuan, kelompok yang terlibat dalam penciptaan *the Doing Business indicators* mampu membatasi wilayah aturan yang dirumuskan dengan penentuan peubah-peubah yang mengatur yang diukur setiap indikatornya. Indikator-indikator, sebagai pengukur keragaan wilayah aturan yang dimaksud kemudian digunakan untuk mengurut Negara-negara berdasarkan skoranya, yang sejatinya membuat suatu peringkat. Dengan mengaitkannya terhadap hasil ekonomi, pemeringkatan ini mempunyai pengaruh kinerja, dan mengilhami dan menyebabkan perubahan di banyak Negara dengan cara membuat pelaku pengatur menyoroti hasil ekonomi pengaturan ini. Mengingat Bank Dunia adalah pencipta *the Doing Business indicators*, Bank Dunia dengan sendirinya juga memiliki kuasa untuk mengatur proses perumusan patokan dari kejauhan. Akhirnya, melalui pengukuran mutu aturan berdasarkan pemberian skor, proses perumusan aturan mengubah isu politik pengaturan menjadi suatu isu teknis angka-angka, metodologi dan "praktek terbaik". Dengan kata lain, proses perumusan patokan mengubah pemerintahan dengan politik menjadi pengaturan melalui angka-angka, sehingga menjadi mekanisme pendisiplinan melalui pemberian angka.

Sebagaimana telah disinggung di atas, pemeringkatan daya saing antar Negara sesungguhnya mengandung kelemahan dan menyesatkan, karena tataan pembangunan antar Negara berbeda-beda dan daya saing itu erat kaitannya dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, hukum dan budaya, maka arah dan pemaknaan indeks daya saing seharusnya juga mempertimbangkannya. Bagi Negara maju misalnya, daya saing seharusnya lebih diarahkan pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi dengan cara, antara lain, pengembangan teknologi dan pembaharuan kegiatan industri dan jasa mereka. Namun, karena *level playing field*<sup>5</sup> harus sama mereka memberi indeks daya saing di tingkat pengembangan yang rendah bagi Negara-negara

<sup>5</sup> Pengertian level playing field tidak jelas. Ada yang suatu keadaan di mana setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk berhasil.



berkembang. Caranya, menurut Shafaeddin 2012 adalah membela pandangan neoliberal, melalui Konsensus Washington, dan mengenakan liberalisasi perdagangan menyeluruh bagi Negara berkembang dengan Lembaga Keuangan Internasional (LKD) atau *the International Financial Institutions (IFIs)* dan Organisasi Perdagangan Dunia atau *the World Trade Organization (WTO)*, dan kesepakatan perdagangan wilayah dan bilateral.

Salah satu kelemahan definisi daya saing suatu bangsa adalah apabila dikaitkan dengan produktivitas. Dua istilah ini berbeda. Suatu Negara kadangkala dapat meningkatkan daya saingnya dengan mengubah strateginya (seperti perlindungan dagang, devaluasi mata uang), tanpa peningkatan produktivitas. Produktivitas mengacu pada kemampuan internal suatu organisasi, sementara daya saing mengacu pada posisi relatif suatu organisasi terhadap pesaingnya. Butir penting lain dalam membatasi daya saing suatu bangsa adalah bahwa ia bermakna hanya di antara bangsa-bangsa yang memiliki keunggulan komparatif yang sama dan bersaing dalam industri yang sama. Menyatakan Indonesia secara umum kurang bersaing dibandingkan Korea tidaklah bermakna karena kedua Negara ini mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda.

Tinjauan literatur baik teoritis dan empiris mempertegas pengertian terdahulu bahwa daya saing istilah yang sulit dan kadang-kadang membingungkan – khususnya begitupun untuk tingkat wilayah. Istilah daya saing seringkali memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, barangkali suatu alasan mengapa istilah ini belum begitu lama merembes ke dalam bahasa ekonomi makro.

### **Kelemahan Ilmu Ekonomi Arus Utama**

Di dalam paradigma pembangunan ekonomi klasik yang berlangsung tahun 1960an, pertumbuhan pertanian diyakini sebagai tonggak penting dalam pembangunan industri, dan bahkan dianggap sama artinya dengan pembangunan ekonomi. Paradigma ini berakar dari cerita nyata kesuksesan, dari sejarah panjang "Pengalaman Barat" ke "keajaiban Asia" waktu lalu. Ini didukung oleh latihan model rumit. Tetapi, meskipun banyak kasus-kasus yang berhasil, pelaksanaan paradigma ini semakin mengalami kesulitan pada tahun 1970an dan awal 1980an karena kebijakan yang mengarah ke industrialisasi pengganti impor yang bias kebijakan harga antipertanian yang kuat (de Janvry 2010). Strategi pembangunan perdesaan terpadu, dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas yang diperkenalkan tahun 1970an yang mencakup penurunan kemiskinan dan ketimpangan, juga terbukti sulit dilaksanakan dengan berhasil, karena antara lain keuntungan pertanian rendah dan pendekatan yang dimotori Negara yang sangat berlebihan. Dengan krisis utang tahun 1982, dan penerapan kebijakan stabilisasi dan penyesuaian berikutnya di bawah Kesepakatan Washington, penggunaan pertanian sebagai suatu instrumen untuk pembangunan ditinggalkan demi memilih pendekatan lain pembangunan seperti industrialisasi ekonomi terbuka untuk mempercepat pertumbuhan dan program pemberian uang tunai atau penyediaan lapangan kerja untuk memerangi kemiskinan.

Dengan beberapa kekecualian penting seperti Tiongkok dan Vietnam di mana pertumbuhan pertanian berbasis petani kecil dilaksanakan secara sungguh-sungguh, biaya-biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kealpaan pertanian ini sangat besar.

Teori ekonomi ini tidak tepat lagi untuk menggambarkan ekonomi yang tidak berkembang – bahkan menyusut dapat memberikan kesejahteraan manusia, sementara memulai pembangunan kembali dunia alami yang sehat, khususnya sejak teori ekonomi harus menyadari bahwa pertumbuhan diperlukan untuk lapangan kerja, lapangan kerja diperlukan untuk pendapatan, dan pendapatan diperlukan untuk kesejahteraan. Untuk tujuan tersebut, perubahan besar-besaran teori ekonomi harus dilakukan (Goodwin 2014), di mana tujuan akhir kesejahteraan manusia harus menjadi titik pusat pada masa kini dan masa depan, sebelum tujuan antara pertumbuhan, kekayaan finansial, atau pemaksimalan konsumsi dan teori harus menemukan caranya untuk mengikutsertakan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk pemerataan, kenyataan ekologis, dan kebutuhan masa sekarang dan masa depan, dan mengidentifikasi tempat-tempat di mana nilai-nilai ini lebih penting daripada nilai-nilai pasar atau harga.

Beberapa krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir ini, telah membuat perhatian terhadap pertanian meningkat lagi baik sebagai penyebab masalah dan sebagai instrumen potensial penyelasiannya. Kembali ke pertanian ini terjadi dalam konteks di mana tujuan pembangunan telah sangat diperluas dan di bawah keadaan kontekstual saat ini untuk mencapai pertumbuhan pertanian yang berubah total, berimplikasi bahwa perhatian kembali ke pertanian tidak dapat diterapkan dengan kembali ke paradigma pembangunan ekonomi klasik.

Selama hampir 25 tahun terakhir, banyak sekali kerangka kebijakan dan kelembagaan yang diterapkan Negara berkembang mengikuti Konsensus Washington, yang menekankan pada peran kekuatan pasar di dalam ekonomi sebagai mekanisme utama untuk pengalokasian sumberdaya dan dimaksudkan untuk mengurangi peran sektor publik. Namun demikian penerapan kebijakan Konsensus Washington pada Negara-negara di mana pasar-pasar masih belum muncul, atau meskipun ada tetapi tidak berkembang dan seringkali gagal, telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Kemudian juga muncul kebijakan pasca-Konsensus Washington yang tidak terlalu ketat seperti Konsensus Washington (misalnya, reformasi sangat cepat mungkin tidak berhasil) dan peka terhadap landasan kelembagaan bagi keberhasilan kebijakan. Meskipun demikian, Chang 2009 berpandangan bahwa pasca-Konsensus Washington tidak berbeda dengan Konsensus Washington. Inti usulan kebijakannya tetap saja sama misalnya pengawasan ketat inflasi, liberalisasi perdagangan, swastanisasi, sementara praktek-praktek kebijakan kelembagaan Konsensus Washington tidak berubah.

Kebijakan Konsensus Washington ini berdampak sangat dalam bagi sektor pertanian. Penyurutan investasi pemerintah dalam investasi barang-barang publik seperti penelitian, pelatihan, penyuluhan dan sarana dan prasarana pertanian telah berakibat buruk produktivitas pertanian. Selain itu, reformasi kelembagaan keuangan yang berorientasi pasar menyebabkan sektor ini semakin sulit mendapatkan akses

kredit. Liberalisasi perdagangan telah mengarah pada serbuan impor yang semakin meningkat, yang telah mengancam penghidupan banyak sekali petani. Dorongan serempak ekspor pertanian pada banyak Negara yang mengkhususkan diri dalam produk yang sama menyebabkan harga-harga produk dan bahkan pendapatan ekspor merosot tajam. Masalah-masalah ini telah mulai diakui oleh pendukung Konsensus Washington (World Bank 2008). Menurut Laporan ini (World Bank 2008) pertanian menyumbang untuk pembangunan dalam banyak cara: (1) Pertanian sebagai suatu kegiatan ekonomi, tumpuan penghidupan, dan penyedia jasa lingkungan sehingga sektor ini merupakan alat pembangunan yang khas; dan (2) Pertanian memiliki catatan penting dalam pembangunan, tetapi pertanian belum diberdayakan secara semestinya untuk pembangunan, (i) Pertanian memiliki kekuatan yang khas dalam pengurangan kemiskinan dan (ii) Pertanian dapat menjadi sektor utama bagi Negara-negara berbasis pertanian. Namun demikian, Bank Dunia (World Bank 2008) melontarkan visi mereka tentang pertanian untuk pembangunan ke depan dengan merumuskan ulang peran-peran produsen, sektor swasta, dan Negara. Pertanian mengemban peran penting dalam agenda pembangunan.

Di satu sisi mereka berpendapat produksi berada di tangan petani-petani kecil, yang tetap menjadi produsen terefisien, apalagi kalau didukung dengan organisasi mereka. Namun, kalau organisasi ini tidak dapat menangkap ekonomi skala dalam produksi dan pemasaran, usahatani komersial padat-tenaga kerja dapat menjadi bentuk usaha yang lebih baik, dan pasar tenaga kerja yang efisien dan adil menjadi kunci utama penurunan kemiskinan perdesaan. Sektor swasta mendorong organisasi rantai nilai yang membawa pasar ke usahatani kecil dan komersial. Negara-dengan peningkatan kapasitas dan pemerintahan yang baik-memperbaiki kegagalan pasar, mengatur persaingan, terlibat secara strategis dalam kemitraan publik-swasta untuk menyebarluaskan daya saing pada sektor agribisnis dan mendorong keterlibatan tenaga kerja usahatani kecil dan perdesaan yang lebih banyak.

Dalam tahap awal pembangunan ekonomi mereka, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Norwegia, Swedia, Taiwan, dan AS semuanya berhasil membangun pertanian mereka sehingga sektor ini menyumbang pada pertumbuhan menyeluruh dan penurunan kemiskinan pada akhir abad ke-19an dan pertengahan abad ke-20an (dan pada akhir abad ke-20an untuk kasus Jepang, Korea, dan Taiwan), kecuali Perancis (meskipun ia memulai tingkat pembangunan pertaniannya yang tinggi, kemajuannya pada masa-masa tersebut tidak memuaskan).

Kebijakan pertanian dan perdagangan pertanian pemerintah-pemerintah di negara-negara maju, khususnya AS dan UE merupakan kelanjutan dari kebijakan mereka yang faktanya menggunakan teori perdagangan strategis untuk mempertahankan pengaruh mereka dalam pasar sejagat bagi komoditas-komoditas pertanian penting.<sup>6</sup> Instrumen-instrumen untuk menerapkan teori perdagangan strategis tersedia melalui kebijakan pertanian yang telah diterapkan AS dan UE sejak

---

<sup>6</sup> Sementara AS dan anggota UE menguasai 50 persen ekspor gandum, AS memiliki pangsa lebih dari 50 persen pada ekspor kedelai dan jagung.

tahun 1950an tanpa terkendala disiplin multilateral.<sup>7</sup> Sebagai contoh, instrumen kebijakan pertanian ditujukan pada pengaturan keluaran di pasar yang sering bermasalah karena pasokan jauh lebih besar daripada apa yang dapat diserap pasar. Kebijakan perdagangan strategis ini baru dapat dijelaskan setelah teori perdagangan strategis muncul pada tahun 1970an dan 1980an sebagai bagian dari teori perdagangan baru. Teori ini menganalisis kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memperbaiki posisi perusahaan (industri) mereka di pasar dunia yang berlangsung dalam persaingan tidak sempurna.<sup>8</sup>

Peranan pertanian di manapun sebenarnya sangat penting, terutama sebagai penyedia bahan pangan. Dalam Deklarasi Roma pada Ketahanan Pangan Dunia dan Rencana Aksi Pertemuan Puncak Pangan Dunia pada 1996, negara-negara peserta memperlihatkan kesungguhan mereka untuk “berjuang memastikan bahwa kebijakan pangan, perdagangan pertanian dan secara umum nyaman untuk memperkuat ketahanan pangan bagi semua melalui system perdagangan dunia yang adil dan berorientasi pasar (Dhar 2007).

Walaupun isu di masing-masing Negara khas, tantangan kebijakan pertanian yang dihadapi Negara-negara pada tahap awal pembangunan ekonomi mereka, saat ini dan waktu lalu ternyata sama di semua Negara. Itu artinya bahwa banyak hal dapat dipelajari dari pengalaman yang lain, baik dari sejarah dan pada saat ini. Negara berkembang dan dalam transisi dapat belajar dari sejarah kebijakan pertanian Negara maju saat ini. Banyak campurtangan kebijakan yang berhasil mereka terapkan berada di luar (atau bahkan bertentangan dengan) cakupan yang dianjurkan Konsensus Washington yang menguasai kebijakan pertanian (atau yang lain) pada 25 tahun terakhir.

Teori pasar efisien tergantung pada gagasan informasi sempurna tentang keadaan pasar – bahkan untuk sampai kini mungkin masih sulit menjadi kenyataan. Tetapi informasi sempurna tentang masa depan jelas tidak mungkin. Ini yang mendorong kemunculan “gelombang busa”, pertumbuhan tinggi dan pemerosotan, dan masa-masa optimisme dan pesimisme yang bergantian dengan cepat dan tidak masuk akal. Investasi saat ini didasarkan pada harga-harga saat ini, dan harapan tentang masa depan. Tetapi harapan berubah-ubah, dan mungkin juga tidak sesuai sama sekali. Keberagaman yang terjadi pada investasi dapat membangkitkan daur saling menguatkan permintaan agregat, mengarah ke masa pengembangan atau penurunan panjang. Oleh karena itu, Harris (2013) berpendapat bahwa untuk

---

<sup>7</sup> Meskipun AS telah menggunakan kebijakan pertaniannya untuk keuntungan strategis terhadap sektor pertaniannya sejak tahun 1930an, ia terkena sanksi legal untuk menggunakan instrumen kebijakan pertanian setelah the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Contracting Parties setuju memberikan penundaan penggunaan Articles II and XI GATT (see GATT [1955]). Pada 1957, Traktat Roma (dikenal sebagai Traktat penetapan Komunitas Ekonomi Eropa) membangun dasar Kebijakan Pertanian Bersama yang mengarahkan kebijakan pertanian negara-negara anggota UE.

<sup>8</sup> Teori ini memadukan penerimaan skala yang meningkat (*increasing returns to scale*), preferensi Dixit-Stiglitz, dan persaingan tidak sempurna dalam model perdagangan internasional untuk menunjukkan bahwa Negara-negara dengan factor keberkahan dan keunggulan komparatif yang sama melakukan perdagangan juga.

menstabilkan ekonomi dibutuhkan pemerintah dengan kebijakan fiskal pelawan-daur dan moneterinya.

Pada akhir-akhir ini telah muncul suatu paradigma baru di mana pertanian dipandang memiliki kapasitas untuk membantu mencapai beberapa dimensi pembangunan penting, khususnya percepatan pertumbuhan PDB di tahap-tahap awal pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pencegahan kerapuhan ekonomi, mempersempit kesenjangan pendapatan perdesaan dan perkotaan, pelepasan sumberdaya terbatas seperti air dan lahan untuk sektor-sektor lainnya, dan memberikan jasa lingkungan yang berlipat-ganda. Ini merupakan akibat dari krisis pada tahun 2000an, seperti: Ketahanan pangan dan kelaparan yang semakin rapuh; Kemandekan pertanian di Anak-Sahara Afrika yang berkelanjutan; Kemiskinan dunia yang pada umumnya di perdesaan; Kesenjangan pendapatan antara perdesaan dan perkotaan yang semakin meningkat; Kelangkaan sumberdaya yang semakin meningkat karena penggunaan yang berlebihan dan ketidak-tepatan penggunaan di pertanian dan keterbatasan pengadaan jasa-jasa lingkungan. Namun, pembangunan ekonomi melalui jalan pengembangan baru pertanian tetap masih tidak lengkap, tidak seimbang dengan pernyataan retorika politik. Kinerja pertanian yang buruk dalam pembangunan dapat dikaitkan khususnya dengan investasi yang rendah dan tidak tepat di pertanian yang terjasi terus menerus oleh sebagian besar pemerintah dan donor sejagat. Mudah-mudahan kesadaran ini dapat merasuk kedalam hati sanubari para pembuat keputusan pembangunan dan perdagangan pertanian di tingkat multilateral, wilayah dan bilateral.

## **KELEMAHAN KONSEP DAYA SAING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN PERTANIAN**

Berfikir dan berbicara tentang daya saing mempunyai tiga macam ancaman (Krugman 1994): (i) ia dapat menyebabkan pemborosan anggaran belanja pemerintah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan daya saing negeri; (ii) ia mungkin mendorong pengalokasian sumberdaya yang salah; dan (iii) ia juga dapat mengarahkan ke sikap perlindungan dan perang dagang; dan dampak semua itu yang terpenting adalah ia dapat menghasilkan kebijakan publik yang buruk dalam rangkaian penanganan isu-isu penting.

Selanjutnya, selajan dengan pendapat Krugman (1994) ini dan dengan kenyataan betapa sulit untuk mengukur daya saing suatu Negara atau wilayah, akan menjadi persoalan di tataan empiris dari sisi data: wilayah; di tingkat manakah daya saing Indonesia akan ditentukan: nasional, wilayah, provinsi/kabupaten/kota/kecamatan atau kelurahan/desa/ kampung/dusun; waktu, tahun/musim/semester/triwulanan/bulanan/ mingguan; dan jenis satuan ekonomi yang mewakili, perusahaan besar/menengah/kecil atau rumahtangga. Selain permasalahan yang terkait dengan perolehan data yang mewakili dimensi-dimensi tadi, perlu juga disadari bahwa daya saing bukanlah sesuatu indeks atau angka yang tidak berubah dan tidak mungkin berubah. Justru untuk itulah pembangunan ekonomi harus

terus dilakukan. Sulit untuk membayangkan bagaimana suatu Negara yang digolongkan sebagai Negara yang mempunyai peringkat daya saing rendah atau peringkat apapun juga yang rendah untuk mengubah keadaan ini dalam konteks perekonomian dunia seperti yang terjadi sekarang ini.

Di dalam teori, perdagangan bebas berfungsi mengoptimalkan pengalokasian sumberdaya di bawah beberapa andaian sederhana ketat (dan biasanya tidak realistis) semacam persaingan sempurna dengan beberapa pasar, produk sejenis, akses universal ke teknologi (dengan tanpa biaya belajar), dan tidak ada eksternalitas atau ekonomi skala. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi-manakala ada kegagalan pasar, maka pasar bebas tidak dapat mengalokasikan sumberdaya secara optimal, dan Negara-negara dapat memperbaiki kedudukannya melalui campur-tangannya menangani (memanfaatkan) kegagalan pasar. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan kekuatan monopoli yang dimiliki perusahaan-perusahaannya di pasar lain. Mereka dapat mendorong pemindahan sumberdaya dari kegiatan yang memberikan penerimaan, pertumbuhan produktivitas, atau manfaat eksternalitas yang lebih rendah ke kegiatan yang memberikan hasil-hasil yang tinggi, di mana mobilitas sumberdaya tertahan oleh kesenjangan informasi, biaya pembelajaran dan keterkaitan yang kurang produktif atau kelembagaan yang hilang. Mereka dapat menjadi fihak pertama yang menikmati skala, cakupan, penggabungan atau pengelompokan (sebagai suatu bentuk utama dari pembentukan eksternaitas penggabungan) di mana mereka berkiprah. Mereka dapat mengkoordinasikan kaitan kegiatan dalam arus produksi atau teknologi yang tidak dapat optimal secara sendiri-sendiri, karena keterkaitan teknologinya. Mereka dapat menciptakan produk baru atau kemampuan inovatif, dan memperkuat atau membangun kelembagaan pendukung.

Sifat kegagalan pasar di Negara berkembang pada khususnya yang beragam dan menyebar telah diketahui, khususnya pada kelambanan memajukan industri dan teknologi meraka. Kegagalan pasar dapat saling terkait untuk menghasilkan banyak keseimbangan, sehingga Negara miskin terjebak dalam perangkap pertumbuhan yang rendah, kecuali mereka membangun strategi yang terkoordinasi untuk berpindah dari kegiatan berketerampilan rendah dan berteknologi rendah ke kegiatan bernilai tinggi.

Analisis Gallagher (2013) menemukan bahwa politik perdagangan abad ke-21 dicirikan oleh suatu benturan kesejagatan atau *clash of globalizations*, seperti kendala kebijakan pada Putaran Uruguay dan juga pembatasan-pembatasan yang dibuat AS atas kemampuan Negara-negara berkembang untuk menggunakan strategi-strategi pembangunan untuk mencapai kemapanan dan pertumbuhan. Di fihak lain, di antara Negara-negara berkembang semakin tumbuh pendapat bahwa mereka juga ingin dan berkepentingan membangun keunggulan mereka saat ini pada komoditas primer dan industri ringan, dan untuk dikembangkan menjadi industri baru intensif bernilai-tambah dan berkeunggulan di kemudian hari. Oleh karena itu, Gallagher (2013) menyimpulkan bahwa kedigdayaan ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan perdagangan sejagat, seperti Putaran Uruguay, meskipun ia merupakan kuncinya. Faktor-faktor lain adalah struktur kelembagaan, politik dalam negeri, gejala mata uang dan gagasan atas kesejagatan.

Liberalisasi perdagangan bukanlah jawaban sempurna untuk meningkatkan perdagangan karena kapasitas pasokan harus ada bagi Negara berkembang untuk mengisi peluang perdagangan. Jalinan antara reformasi perdagangan dan penyediaan bantuan masih diperdebatkan dan banyak Negara-negara berkembang dan LSM khawatir tentang bantuan digunakan sebagai alat untuk menekan Negara-negara untuk meliberalisasi. Negara-negara berkembang juga secara potensial menghadapi kehilangan ruang kebijakan yang penting melalui persetujuan dalam perundingan Perjanjian Pertanian, OPD. Ini akan terasa sekali bagi negara berkembang dibanding negara maju, karena negara maju sudah sejak lama menyiapkan diri. Padahal secara tersamar OPD sebetulnya bukanlah fora untuk membangun kekuatan persaingan, melainkan kerjasama yang harusnya saling menguntungkan, sebagaimana dinyatakan dalam mukadimah pendirian OPD itu yakni:

*".....members' long-term objective.....is to establish a fair and market-oriented agricultural trading system and that a reform process should be initiated through the negotiation of commitments on support and protection and through the establishment of strengthened and more operationally effective GATT rules and disciplines";*

*"the above-mentioned long-term objective is to provide for substantial progressive reductions in agricultural support and protection sustained over an agreed period of time, resulting in correcting and preventing restrictions and distortions in world agricultural markets" (WTO 1999).*

Baru-baru ini Antimiani dkk (2005) menguji pengaruh liberalisasi perdagangan pertanian melalui berbagai skenario yang mengikutsertakan hasil interaksi antara strategi kelompok Negara dalam perundingan. Kesimpulan utama adalah bahwa manfaat liberalisasi perdagangan pertanian dalam kajian ini serupa dengan hasil yang diperoleh kajian Bank Dunia (Bandara and Yu 2007). Menurut Antimiani dkk (2005), manfaat kesejahteraan sejagat total adalah AS\$ 69.2 triliun (2013) dan manfaat kesejahteraan di Asia-Pasifik total adalah AS\$ 31.6 triliun (sekitar 46 persen), yang sebagian besar dinikmati Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand, sementara Bangladesh, China, Indonesia dan Viet Nam menderita kerugian. Namun, bertolakbelakang dengan hasil di atas dan banyak kajian Keseimbangan Umum Terukur/KUT atau *Computable General Equilibrium/CGE* yang lain, secara umum manfaat kesejahteraan liberalisasi perdagangan menengah saja (Bouet dkk 2004a and 2005).

Pengaturan kekayaan intelektual sejagat telah berubah dalam 3 dasawarsa terakhir ini, dan perubahan ini menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi Negara-negara yang terlambat berkembang. Apa yang dulu sejatinya suatu instrumen kebijakan nasional, tetapi sekarang harus tunduk pada ketentuan internasional, karena dunia bergerak semakin dekat menuju keselarasan pada bidang pengelolaan kekayaan intelektual. Namun, bergerak menuju keselarasan dan mencapai keselarasan adalah hal yang berbeda, dan perlu diingat bahwa kata sebelumnya dan bukan yang terakhir yang menjelaskan pengaturan saat ini: kecenderungannya adalah ke arah pengurangan ruang kebijakan. Shadlen (2005) menyimpulkan bahwa kecenderungan

ke arah keselarasan membuat hambatan baru dan mencolok bagi peluang Negara berkembang untuk inovasi kebijakan dalam pengelolaan kekayaan intelektual.

Sejak NAFTA diperkenalkan tahun 2004, Wise (2007) mengamati bahwa petani jagung tradisional Meksiko telah mengalami kesulitan pada keadaan lingkungan dan ekonomi. Tidak lebih dari satu dasawarsa, hampir sejuta petani mungkin melantarkan lahannya karena desakan ekonomi yang berasal dari peningkatan impor, penurunan harga jagung dan tanaman tradisional, pelemahan permintaan setempat dan wilayah, penurunan drastis dukungan sektor publik bagi pertanian. Kehilangan jagung tradisional ini, maka tercatatlah kehilangan keanekaragaman-bio pertanian yang telah dijaga petani dan leluhurnya selama berabad-abad.

Meskipun daya saing kemungkinan berpotensi meningkatkan pertumbuhan perdagangan suatu Negara, tetapi ia tidak secara serta merta menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa selama 65 tahun terakhir pertumbuhan perdagangan dunia yang pesat berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi disertai penurunan tarif industri yang sangat tajam di negara-negara maju dari 30 persen lebih menjadi dibawah 5 persen (Turner 2014). Pasar tunggal Eropa mendorong peningkatan perdagangan sesama Negara Eropa. Jepang, Korea Selatan dan Taiwan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Negara-negara maju dilandasi pada pertumbuhan yang mengandalkan ekspor.

China mengikuti jejak ini selama 30 tahun. Perdagangan bertumbuh sekitar dua kali lipat daripada pertumbuhan keluaran dunia dari 1990 sampai 2008. Namun, ini bukanlah sesuatu yang harus berjalan seperti itu, karena tidak ada alasan bahwa perdagangan harus bertumbuh dengan laju lebih tinggi dari PDB terus menerus. Bahkan, meskipun hambatan perdagangan tidak ada sama sekali, perdagangan mungkin saja bertumbuh jauh lebih lambat dari PDB pada beberapa masa, karena: (1) pola konsumsi di Negara-negara maju sedang terjadi, di mana orang-orang lebih kaya meningkatkan pangsa pendapatan mereka untuk jasa-jasa yang tidak mungkin diperdagangkan (misalnya, makanan di restoran) atau sulit diperdagangkan (seperti jasa kesehatan). Pangsa kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi cenderung mengarah pada kegiatan sektor tidak-diperdagangkan. Sebagai dampaknya konsumsi tidak-diperdagangkan akan semakin meningkat; (2) intensitas perdagangan untuk barang-barang manufaktur mungkin juga menurun karena biaya tenaga kerja semakin meningkat; (3) kemajuan pada teknologi informasi mungkin menyebabkan peningkatan perluasan automasi, sehingga kegiatan manufaktur mungkin akan kembali ke Negara-negara maju untuk mendekati dirinya ke konsumen dan mengurangi biaya angkutan. Intensitas perdagangan optimal tergantung dari banyak faktor, seperti biaya upah relative, biaya angkutan, tingkat produktivitas dan dampak ekonomi skala. Perdagangan dunia akan tetap mempunyai peran penting, tetapi liberalisasi selanjutnya semakin menurun peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengandalkan model pertumbuhan dengan pengutamakan ekspor untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur akan semakin sulit di masa depan.



Evolusi dari pemikiran untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan memunculkan beberapa model analisis untuk menjelaskan mengapa negara-negara mau berdagang satu sama lain, selain sekedar karena keunggulan daya saing masing-masing, dan membuat rumusan kebijakan bagaimana sebaiknya perdagangan harus dilakukan. Beberapa model yang dicatat dalam literatur antara lain adalah: (1) Smith; (2) Ricardo; (3) Hechscher-Ohlin; (4) Faktor khas; (5) Teori perdagangan baru; (6) Gravitasi; (7) Teori Ricardian; (8) Teori kontemporer; (9) Teori perdagangan Ricardian baru; (10) Barang setengah jadi yang diperdagangkan; dan (11) Teori perdagangan Ricardo-Sraffa. Namun, satu pun dari teori ini belum dapat menjawab dengan baik pertanyaan mengapa perdagangan antar berbagai negara terjadi, apalagi mencari jawaban yang berlaku umum bagi setiap negara, sehingga rumusan kebijakannya pun banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi suatu atau berbagai negara.

Helpman (1998) menyatakan bahwa memang kita saat ini telah memiliki ragam teori perdagangan internasional yang mengutamakan ekonomi skala, pemilahan produk dan perbedaan komposisi faktor sebagai penentu dari struktur perdagangan dunia. Kalau dipadukan, mereka dapat menjelaskan pola pokok pengkhususan perdagangan, volume perdagangan, kandungan faktor perdagangan, dan pola perdagangan antar kawasan secara luas. Meskipun upaya penelitian secara massif selama 20 tahun terakhir telah berjalan, tetapi hasil-hasilnya belum lengkap. Ini adalah akibat dari kenyataan bahwa kita mengejar ke titik sasaran yang bergerak, karena sifat perdagangan dunia berubah dengan laju sangat cepat.

WTO (2013) mencoba menjelaskan ini dengan mengemukakan ada faktor-faktor ekonomi yang mendasarinya, seperti pertumbuhan kependudukan, investasi, perkembangan teknologi, energi dan sumberdaya alam lain, biaya angkutan dan mutu kelembagaan. Namun semuanya itu berlangsung **di dalam dan tidak terlepas dari konteks sosial ekonomi yang lebih luas**, yaitu perkara sosial, ekonomi makro dan keuangan, dan lingkungan. Isu ekonomi makro dan keuangan berulang-kali mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan dalam kebijakan perdagangan dan perkara lingkungan merupakan isu yang cepat mendapat perhatian dalam perdebatan kebijakan di tingkat nasional, kawasan dan sejagad dan sekarang semakin dilihat kaitannya dengan perdagangan. Namun demikian, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sebetulnya hubungan antara faktor-faktor ini dengan perdagangan tidaklah searah, tetapi perdagangan juga dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Demikian pula faktor-faktor sendiri jga saling mempengaruhi.

## **KEKUATAN INOVASI DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN UNTUK Mendukung Daya SAING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Tiga doktrin ekonomi abad ke 20 yang bersaing dan digenggam oleh penentu kebijakan di Barat saat ini adalah doktrin ekonomi neoklasik konservatif, neoklasik

liberal, neo-Keynesian. Namun, dalam perkembangan ekonomi akhir-akhir ini doktrin keempat melesat melewati ke tiganya, yaitu ekonomi berbasis-pengetahuan. Mengikuti arus penyejagatan yang menyertai dan mendorong peralihan dari produksi massal, ekonomi terkelola secara korporasi ke ekonomi kewirausahaan berbasis pengetahuan melalui inovasi. Inovasi adalah upaya untuk membuat ekonomi berkembang dengan cara menciptakan kekayaan dengan memproduksi barang-barang bernilai tinggi dari bahan-bahan yang ada, di dalam negeri atau impor.

Kekayaan ini didapat dari melalui akumulasi yang dihasilkan oleh penjualan bahan-bahan mentah yang berlimpah. Langkah berikutnya, tidak menjual bahan mentah lagi, tetapi memproduksi barang-barang olahan dari sumberdaya alam yang ada di dalam negeri, tentu saja dengan bantuan tenagakerja, yang merupakan sumber kekayaan. Modal saja tidak berdaya untuk menciptakan apapun, tetapi membutuhkan tenagakerja untuk mengolah bahan sederhana menjadi bahan yang lebih rumit, barang belum jadi ke barangjadi. Tenagakerja memproduksi barang dan menerima dari sana menerima upah, sehingga daur ekonomi berputar. Kalau daur ekonomi ini tidak terjadi, pembangunan dengan sendirinya juga tidak berjalan. Jadi, modal, tenagakerja, bahan mentah, pabrik, angkutan, akses ke pasar (dalam negeri dan luar negeri) semuanya dibutuhkan untuk membuat daur ekonomi berjalan dan menjaminkannya agar tetap berjalan.

Pembangunan ekonomi umumnya mengikuti suatu jalur baku dan terduga sesuai dengan rantai nilai. Bahan baku diekspor dan modal yang diperoleh disalurkan untuk industri berbiaya murah, misalnya tekstil, produk tekstil dan alas kaki yang mampu bersaing di pasar dunia yang selanjutnya mendatangkan investasi dan devisa. Pabrik-pabrik tekstil digantikan industri perakitan bernilai tambah akibat peningkatan upah. Biaya investasi industri perakitan lokal biasanya kecil, tetapi memberikan upah yang lebih tinggi. Pengalaman di China, pertumbuhan sektor pertanian, kesempatan kerja luar-pertanian dan industri perdesaan dan pengembangan pasar dalam negeri dan dunia telah mengubah wajah perdesaan pertanian dan berperan penting dalam memajukan bangsanya.

Tahap selanjutnya adalah pemanfaatan basis sumberdaya alam. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan pemerintah untuk mengarahkan investasi pada industri berat yang dilindungi di pasar dalam negeri dan tersubsidi di pasar ekspor sampai tahap keahlian teknis, skala manufaktur dan efisiensi berdaya saing secara regional dan internasional. Kemudian, investasi diarahkan ke tingkat nilai yang lebih tinggi, seperti pembangunan kapal, mesin-mesin, pabrik mobil dan lain-lain. Untuk menganekaragamkan basis industri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan industri permobilan mendorongnya dan pada saat yang sama mendukung industri berat lokal dengan permintaan dalam negeri.

Sebagian besar Negara maju dan banyak Negara sedang berkembang yang menonjol saat ini setidaknya mengikuti jalur ini. Korea dan Jepang yang miskin sumberdaya alam menempuh jalurnya mulai dari industri tekstil, produk tekstil dan perakitan menuju industri berat sejalan dengan peningkatan kekayaan nasional. Tiongkok, India, Brazil, Russia mengarahkan sumberdayanya langsung ke industri

berat. Sayangnya, persetujuan OPD menutup jalur ini bagi Negara belum berkembang dengan tidak mengizinkan mereka melindungi industri-industri lokal mereka, sementara mengembangkan keahlian warga mereka ke tingkat persaingan di pasar dunia.

Strategi inovasi harus termasuk kebijakan dan mekanisme yang mempengaruhi kemampuan Negara untuk mendapat gambaran tentang pengetahuan sejagat dan juga upaya litbang dalam negeri. Strategi seperti ini, menurut pendapat Dahlman (2008) akan dipengaruhi kebijakan yang menyangkut perdagangan, investasi asing, alih teknologi, litbang dalam negeri, atau lebih umum modal insani dan pendidikan .

Laju penciptaan dan penyebar-luasan pengetahuan telah semakin meningkat. Karena stok pengetahuan sejagat meningkat dengan cepat, inovasi dalam konteks Negara berkembang harus dianggap tidak sekadar penciptaan pengetahuan baru yang baru kepada dunia, tetapi juga dalam pengertian produk atau jasa atau bentuk organisasi yang baru terhadap praktek setempat, tidak perlu pada praktek sejagat. Lebih jauh inovasi dapat saja masih baru bagi Negara, baru terhadap sektor, atau pada tahap lebih kecil, ke perusahaan. Oleh karena itu perlu dibedakan tiga sumber inovasi. Pertama, perolehan teknologi yang telah sintas di luar negeri. Kedua, penciptaan pengetahuan baru yang relevan di dalam negeri<sup>9</sup>. Ketiga, penyebar-luasan dan penggunaan efektif pengetahuan baru ini, apakah diciptakan secara setempat atau diimpor dari luar negeri, di dalam ekonomi. Inovasi dipengaruhi regime ekonomi dan kelembagaan yang lebih luas, mencakup keadaan makro suatu Negara (inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang dalam negeri), lingkungan bisnis (aturan hokum, mutu dan keefektifan pemerintahan termasuk apakah peraturan tepat atau berlebihan, dan kebijakan persaingan); mutu dan keefektifan sarana dan prasarana fisik, informasi dan komunikasi; dan pendidikan dan keterampilan penduduk dan angkatan kerja prasarana.

Pertanian memberikan lebih dari sekadar pangan. Ia menawarkan matadagang yang penting, jasa lingkungan dan barang-barang sosial yang mempermudah pembangunan ekonomi, industrialisasi dan penganeka-ragaman (*World Economic Forum/WEF* 2010). Dari awalnya tujuan pertanian adalah memberi pangan dan bahan bakar bagi kegiatan manusia. Dan sekarang, ia semakin penting. Investasi yang lebih besar di pertanian diperlukan untuk mengurangi kemiskinan di perdesaan dan memperbaiki ketahanan pangan. Ini tidak berarti sesederhana meningkatkan pasokan tetapi memastikan bahwa pangan yang cukup dan bergizi tersedia bagi setiap orang pada setiap saat. Bagaimana investasi dibuat, konteksnya dan keadaannya paling tidak sama pentingnya dengan berapa besar investasinya (Oxfam International 2014).

---

<sup>9</sup> Teknologi, dari manapun asalnya, perlu disesuaikan dengan keadaan setempat, apalagi untuk pertanian seperti teknologi baru benih hibrida. Untuk itu penelitian dan percobaan berkelanjutan dibutuhkan untuk menyesuaikannya dengan keadaan suhu, tanah, dan air serta hama dan penyakit setempat. Dalam hal lebih sempit bahkan teknologi industri harus disesuaikan dengan keadaan setempat, seperti dalam hal bahan baku, ciri-ciri khusus atau sifat masyarakat setempat seperti sumber tenaga pembangkit listrik, baku setempat dan keadaan iklim dan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Gelombang penguasaan lahan skala besar akhir-akhir ini yang menyertai investasi pertanian yang lebih besar telah menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak pada keamanan pangan dan kehidupan perdesaan. Studi-studi kasus dari seputar dunia menunjukkan bagaimana akibat negatif lebih sering melebihi manfaat terbatas untuk masyarakat petani kecil.

Perluasan monokultur skala besar, diarahkan oleh dinamika pasar dunia dan pasar keuangan cenderung memperdalam pemusatan pemilikan lahan, merintang akses yang sama untuk sumberdaya, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan penduduk setempat, menciptakan keadaan kerja yang tidak adil dan menciptakan risiko bagi kehidupan turun-temurun petani skala kecil. Tanggung jawab sosial korporasi member manfaat kecil kalau masalah yang tercipta oleh model bisnis tidak diselesaikan.

Investasi yang bertanggung-jawab harus mengakui titik pusat investor terbesar pertanian: produsen skala kecil, khususnya wanita. Ia harus menambah, bukan menggantikan investasi yang dibuat produsen-produsen ini, memenuhi kebutuhan dan tantangan mereka dan membantu mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan investasi harus dibangun dalam kewajiban hak azasi manusia dan menghindari pengecilan arti hak dan kehidupan produsen skala kecil dan masyarakat setempat. Biaya sosial dan lingkungan harus diinternalisasikan oleh investor atau dikompensasikan secara proporsional untuk menghindari penciptaan keuntungan pribadi yang dibayar oleh masyarakat setempat dan masyarakat secara umum.

Akhirnya, peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan kerangka bagi investasi swasta yang di dalamnya kebijakan, aturan dan kelembagaan memastikan bahwa manfaat dan biaya menyebar secara adil dan semua hak-hak dijamin. Investasi publik dalam brang publik, seperti sarana dan prasarana, pasar informasi, pendidikan, jasa penelitian dan penyuluhan pertanian akan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang kuat yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

## **MERINTIS ARAH BARU PERDAGANGAN DUNIA DALAM MEWUJUDKAN SASARAN KEAMANAN PANGAN, PENGHIDUPAN DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN**

Usulan untuk meliberalisasi perdagangan pertanian dibangun dari pendapat-pendapat, yang asal-muasalnya dapat dilacak ke belakang, yakni teori perdagangan internasional murni. Menurut pendapat-pendapat ini, liberalisasi perdagangan menghasilkan "jawaban optimal", tetapi hanya terjadi pada keadaan pasar dambaan. Beberapa andaian yang dibutuhkan untuk itu adalah: (a) pasar diandaikan bersaing sempurna, (b) produsen meminimumkan biaya dengan kendala skala penerimaan yang tetap, (c) konsumen memaksimumkan kepuasan mereka, dan (d) semua pasar, termasuk untuk tenaga kerja, berjalan dengan sempurna dengan diikuti penyesuaian harga-harga. Namun, teori pasar efisien tidak mungkin saat ini juga dan bahkan

informasi sempurna tentang masa depan jelaslah tidak mungkin (Harris 2013). Sebagai buktinya adalah kemunculan ekonomi balon (*bubble economy*), pertumbuhan dan kemerosotan ekonomi, dan masa-masa optimisme dan pesimisme yang tak masuk akal.

Untuk merintis arah baru perdagangan dunia, yang pertama dilakukan adalah dengan meninjau kembali segala kesepakatan yang diambil dalam beberapa fora kerjasama perdagangan selama ini dan pada saat yang sama menguatkan struktur pertanian dan mengarahkan pembangunan dan pemutakhirannya untuk mewujudkan sasaran Keamanan Pangan, Keamanan Penghidupan/Pendapatan dan Pembangunan Pedesaan. Mungkin Indonesia perlu belajar dari pengalaman Negara Tiongkok yang berpenduduk sangat padat. Fasilitas seperti Keamanan Pangan, Keamanan Penghidupan/Pendapatan dan Pembangunan Pedesaan yang diberikan OPD kepada Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik. Indonesia, dan sekutunya dalam K-33 harus mampu merumuskan dengan baik apa yang mereka inginkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, karena fakta menunjukkan bahwa Negara-negara lain, terutama Negara maju cenderung tidak mau mengalah dan berusaha memanfaatkan fasilitas yang seimbang untuk menandingi fasilitas yang diperoleh Negara-negara berkembang. Hal ini telah terbukti dari kenyataan kebuntuan perundingan Doha yang sampai saat ini masih belum tuntas.

Penghidupan mempunyai makna yang lebih luas daripada pendapatan, karena pendapatan hanyalah salah satu aspek penghidupan. Pertanian masih merupakan sumber penghidupan di wilayah perdesaan yang memberikan kesempatan kerja, meskipun menurut beberapa peneliti dan data menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah menjadi pekerjaan sampingan, karena pendapatan yang diperoleh darinya sudah jauh di bawah 50 persen pendapatan rumahtangga petani.

Namun, ini merupakan akibat dan bukan sebab, mengingat kesempatan kerja di perdesaan sangat terbatas dan pembangunan di perdesaan jauh lebih lambat dibanding di perkotaan dan setiap orang, termasuk penduduk di perdesaan, menginginkan dirinya melakukan suatu kegiatan yang berguna, baik kegiatan yang tidak mengharapkan upah atau kegiatan yang mengharapkan upah (pekerjaan). Sesungguhnya kegiatan seseorang memiliki tiga fungsi (Goodwin 2014) : (1) memberi pendapatan kepada pekerja di bidang pertanian, karena kegiatan dilakukan sebagai pekerjaan yang member upah, (2) menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi siapa saja yang menggunakannya. Pengguna produksi pertanian, antara lain: konsumen, sedangkan pengguna keluaran dari kegiatan yang tidak berupa beragam jenis dan tidak punya nama baku dan kadang-kadang termasuk si penggiat sendiri, misalnya kasus produksi pangan untuk keluarga petani sendiri, (3) kegiatan itu sendiri mempunyai arti positif bagi si penggiat, apakah karena dilakukan dengan orang lain yang menciptakan hubungan positif, atau karena si penggiat menikmati perasaan bahwa pekerjaan berjalan dengan baik, atau merasa gembira karena menghasilkan sesuatu yang bernilai kepada orang lain, atau karena memenuhi kepuasan hasrat kreatif. Ilmu ekonomi arus utama mengabaikan semua ini. Setidaknya dalam satu abad ini ilmu ekonomi arus utama: (1) telah mengajarkan bahwa ganjaran relevan ekonomis

dari berkegiatan adalah upah, padahal berkegiatan mempunyai ganjaran positif lainnya yang tidak dapat diabaikan, (2) telah meletakkan pemahaman kita tentang upah dalam teori harga baku, dalam kerapihan titik potong kurva penawaran dan permintaan dengan nilai keluaran pekerja yang disewa terakhir dalam suatu kelompok tertentu (nilai produk marjinal) digunakan sebagai penentu upah. Memang betul ini merupakan faktor sangat penting, tetapi banyak unsur-unsur lain juga yang menentukan mengapa suatu jenis kegiatan, atau seorang penggiat menerima upah yang lebih tinggi daripada yang lain, dan (3) mengabaikan kegiatan-kegiatan ekonomis dan soaial penting yang banyak jumlahnya yang dilaksanakan bukan karena dorongan upah.

Ekonomi makro arus utama saat ini telah menganjurkan peran pasar yang semakin besar di satu fihak dan keturut-campuran pemerintah yang semakin kecil di fihak lain. Dengan perubahan semacam ini, sektor swasta dalam dan luar negeri semakin berperan. Melalui hasil-hasil perundingan di OPD, beberapa fasilitas dan peluang perdagangan dan investasi semakin terbuka bagi perusahaan-perusahaan lintasbangsa. Mereka semakin terpadu secara vertikal, meliputi seluruh pengelolaan mulai dari produksi dan pemasaran benih sampai penjualan hasil produksi, pengolahan dan persebaran pangan (FAO 2002). Ketika mereka menguasai bagian terbesar rantai pasok, korporasi besar ini dapat menimbulkan kekuatan monopoli penjualan dan pembelian, sehingga peran petani-petani dan pengecer-pengecer semakin terdesak. Melalui kontrak produksi atau pemilikan bersama atas pengelolaan lahan atau ternak, mereka dapat mengikat petani untuk membeli masukan dari perusahaan dan menjual hasilnya hanya kepada perusahaan tersebut. Petani juga dapat kehilangan kemampuan kewirausahaannya dan hanya menjadi pekerja pada usahatani mereka sendiri. Perusahaan lintasbangsa dapat dan memang acapkali memindahkan pengelolaannya dari satu Negara ke Negara lain untuk mencari biaya terkecil, termasuk tingkat upah, baku upah tenaga kerja dan lingkungan yang tidak ketat (FAO 2002).

Menurut Kullman (2914 dalam Wise 2014b) keterlibatan swasta akan meningkatkan kemampuan untuk impor pangan, memperbaiki kebijakan perdagangan, membuat arus bebas pangan lebih baik, memperkuat system pangan pertanian dan rantai nilai, mengembangkan cara-cara baru untuk peningkatan masa simpan, kesegaran dan ketersediaan jenis pangan, menyediakan pendidikan gizi untuk mendorong cara-cara makan yang sehat. Namun, hal ini tentu akan menafikan peran petani kecil atau sempit. Ruang gerak mereka dalam proses produksi pangan semakin terbatas, karena produk mereka tidak mampu bersaing lagi di pasar dalam negeri. Perusahaan-perusahaan besar dapat dengan mudah meningkatkan impor, dan membuat impor lebih murah, membuat bahan-bahan pangan dalam rantai nilai yang didominasi perusahaan multibangsa dan menyediakan pangan yang lebih segar bagi konsumen perkotaan kelas menengah, yang dapat didorong untuk mengkonsumsi pangan olahan yang lebih sehat yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tadi (Wise 2014b). Tampaknya keberadaan petani kecil ini diprakirakan memang akan sirna dalam beberapa puluh tahun ke depan. Bahkan dalam laporan WEF yang lain "*Putting the New Vision for Agriculture into Action: A Transformation Is Happening*" (WEF 2012), sumbangan pertanian skala kecil terhadap produksi pangan sejagat akan

merosot dari 40 persen pada 2010 menjadi nol sampai tahun 2030, dan akan digantikan usahatani skala industri besar (yang kemungkinan bersifat tanaman tunggal). Kalau saat ini produksi pangan Indonesia sebagian besar dihasilkan dari petani-petani kecil, lalu siapa lagi yang akan memproduksi pangan ini untuk dijual ke pasar-pasar skala kecil di perdesaan dan pasar-pasar tradisional di perkotaan serta bagi penduduk miskin di masa depan?

Fuglie *et al.* 2012 mencatat pemusatan pada beberapa industri masukan pertanian sejagat telah meningkat secara mencolok; sampai tahun 2009, empat perusahaan terbesar dalam sektor benih tanaman, kimia pertanian, kesehatan hewan, genetika/pemuliaan ternak, dan mesin-mesin pertanian menguasai lebih dari 50 persen penjualan pasar sejagat di setiap sektor. Faktor yang mempengaruhi perubahan struktur dan pemusatan pasar ini berbeda di antara industri dan menyangkut kekuatan pasar, kemunculan teknologi baru, dan kebijakan pemerintah.

Memproduksi pangan adalah kegiatan utama kemanusiaan (IAASTD 2009 dalam Heinemann *et al.* 2014). Sekitar separuh produsen, terutama penduduk miskin, melakukan usahatani untuk memberi makan mereka sendiri dan keluarganya; mereka menghasilkan 20 persen dari pangan dunia (Fess *et al.* 2011 Heinemann *et al.* 2014). Terlepas dari produksi yang tersebar ini, sebagian besar kalori yang berasal dari tanaman dunia saat ini diperoleh dari monokultur yang massif, bukan lagi dengan tumpang sari atau tanam bergilir, seperti sistem pergantian tanaman jagung dan jagung/kedelai di wilayah tengah AS.

Krisis harga pangan baru-baru ini menggambarkan kerawanan sistem pangan sejagat yang seperti itu. Penyebabnya antara lain adalah keterpaduan yang semakin mendalam antara pasar pertanian, energi dan keuangan dalam satu dunia yang semakin terkendala sumberdaya dan diperburuk lagi oleh perubahan iklim (Wise and Murphy 2012). Perusahaan multibangsa yang kuat menguasai pasar-pasar ini. Wise and Murphy 2012 berpendapat banyak pihak berkepentingan yang berpengaruh dominan dalam kebijakan nasional dan sejagat – memperlambat, mengalihkan, menghentikan tindakan yang dibutuhkan untuk mendulang manfaat dari kebijakan dan praktek seperti ini.

Pada sidang 6 Desember 2008, Negara maju telah menyetujui untuk mengurangi subsidi dalam jumlah besar, tetapi meminta Negara berkembang membuka pasar bukan-pertanian sebagai imbalan kerugian pertanian mereka, sehingga Putaran Doha menjadi buntu (Wise 2013b). Zhou (2013) juga mengamati bahwa negara-negara kaya telah membeli/menyewa lahan dari Negara-negara miskin, sehingga bentuk baru kolonialisme terjadi melalui penguasaan lahan yang menyebabkan petani kecil di Negara berkembang semakin terdesak.

Dalam pernyataannya pada 25 Februari 2009, Pascal Lamy, Direktur Jenderal, OPD secara tersamar mengakui bahwa masa depan perdagangan Negara berkembang perlu diperbaiki melalui Agenda Pembangunan Doha, tetapi semua Negara perlu membuat keputusan yang sulit, karena perundingan perdagangan multilateral menyangkut dua hal: memberi dan menerima, karena tidak ada satu Negara pun

memperoleh semua yang ia mau, dan tidak ada satu Negara pun kehilangan semua tanpa imbalan yang setimpal. Bagi AS dan UE tidaklah mudah mengurangi subsidi pertaniannya atau Tiongkok menurunkan tarif industrinya lebih jauh. Oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban yang pas perlu dicari. Negara berkembang tidak sanggup karena industri dan jasa mereka terlalu lemah berhadapan dengan industri dan jasa Negara maju.

Para penanggap telah memperingatkan bahwa pengendalian impor murah adalah strategi jangka-pendek, yang sekali subsidi pertanian di Amerika Utara dan Eropa dikurangi, biaya pangan impor akan meningkat dengan sendirinya (Weis 2004). Sementara itu, bangsa-bangsa kehilangan produsen domestik, meningkatkan pengangguran dan masyarakat umum semakin tidak sanggup untuk menghadapi kenaikan biaya-biaya. Stiglitz (2002) mengemukakan:

*"Trade liberalization is supposed to enhance a country's income by forcing resources to move from less productive uses to more productive uses; as economists would say, utilizing comparative advantage. But moving resources from low-productivity uses to **zero** productivity does not enrich a country, and this is what happened aU too often under IMF programmes".*

Di Negara-negara Karibia, impor pangan murah telah membanjiri pasar dalam negeri, mengganggu sektor pertanian setempat yang semakin tidak dilindungi dan tidak disubsidi dan sedang mengalami pengalihan selera dari pangan dalam negeri ke barang-barang impor, sementara membiarkan wilayah-wilayah yang rawan pangan terhadap gejolak yang tak terduga pada pasar internasional (Iqbal 1993, Timms 2006, Deep Ford and Rawlins 2007 dalam Timms 2008, Weis, 2004;).

Dalam pertemuan tingkat menteri di Denpasar, Bali, Indonesia, bulan Desember 2013 sampai saat ini juga belum mendapatkan kesepakatan, Ada banyak isu yang ingin dirundingkan, tetapi yang paling menonjol adalah bantuan domestik (dalam kerangka kebijakan Keamanan Pangan Nasional) dan fasilitasi perdagangan. India ingin melakukan sesuatu tentang ketahanan pangannya untuk mengurangi kelaparan kronis dengan akan membeli pangan utama dari petani-petani kecil pada harga-harga yang ditetapkan, umumnya di atas tingkat harga, sehingga juga mendukung pendapatan beberapa masyarakat paling menderita di Negara ini (Wise 2013a). Menurut India, ini merupakan cara pengefektifan biaya dalam mengatasi kelaparan kronis, khususnya di wilayah perdesaan. Memang ini tidak murah; biaya tahunan diduga sekitar \$20 billion. Menurut India dan Negara-negara sekutunya di K-33 menganggap program seperti ini tidak mengganggu perdagangan, sehingga seharusnya layak dimasukkan dalam Kotak Hijau (*Green Box*) sehingga tidak perlu dikurangi.

Namun, AS dan Negara-negara Eropa lainnya berpendapat sebaliknya, sehingga tetap harus dipangkas. Di sisi lain, Program Bantuan Gizi Tambahan AS/PBGT atau *the United States' Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)* juga tidak murah, dengan biaya sekitar \$78 billion tahun lalu untuk membantu jumlah peserta yang jauh lebih sedikit. Dalam perundingan anggaran dan usulan undang-undang



pertanian atau *farm-bill*, Kabinet Obama telah menyatakan dukungannya pada pendanaan PBGT. Lebih buruk lagi, komitmen AS dan UE dalam Agenda Pembangunan Doha (APD) yang kukuh untuk secepatnya mengurangi atau menghapus subsidi dan kredit ekspor – bantuan pemerintah yang paling langsung mengganggu perdagangan - tetap tidak jelas, tanpa jadwal yang pasti. Sementara subsidi domestik mereka (Negara Maju) banyak yang dimasukkan ke kelompok Kotak Hijau padahal produk pangan ini banyak yang diekspor (Wise 2014a). Pertanyaannya, bagaimana mungkin Negara Maju menganggap program pengentasan kelaparan India ini, sebagai bantuan domestik ini harus dipangkas, sementara Negara Maju dengan mudah mencantumkan di Kotak Hijau, padahal sebagian besar dana itu dipakai untuk membiayai program pangan untuk orang miskin di AS, tetapi sebagian untuk subsidi petani jagung, gandum, kedelai dan padi.

Tanaman-tanaman ini tidak hanya diekspor, jagung dan kedelai juga dipakai sebagai masukan untuk pakan ternak, dan jagung adalah masukan utama untuk etanol. Subsidi masukan harus dinyatakan sebagai pengganggu pasar, tetapi diperlakukan sebagai subsidi yang tidak mengganggu perdagangan. AS mengekspor baik daging dan etanol. Sampai saat ini (detik-detik terakhir tenggat waktu 31 Juli 2014) India bersikukuh, mereka meminta imbalan dari penandatanganan permutuan perdagangan berupa kemajuan perundingan yang sejajar di bidang lain, terutama dalam cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan mereka. Secara khusus mereka menginginkan ada persetujuan tetap pada cadangan pangan bersubsidi sebelum tahun 2017.

Walaupun putaran perundingan tentang penyusunan pola dan kebijakan perdagangan multilateral, wilayah dan bilateral terus berjalan dan Indonesia selalu mengikutinya, tetapi penerapannya tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Di saat seperti inilah Indonesia perlu aktif berperan. Untuk itu, sebaiknya Indonesia mengkaji kembali berbagai kesepakatan perdagangan yang dibuat selama ini dan yang akan dirundingkan baik di tataan multilateral, wilayah dan bilateral. Kesepakatan perdagangan yang kita butuhkan adalah kesepakatan yang tidak membelenggu Negara kita dalam perumusan kebijakan yang mendorong pembangunan yang dinamis di mana Indonesia dapat menyusun kebijakannya yang efektif untuk industrialisasi, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan melindungi lingkungan. Kalau tidak demikian, kapan lagi waktunya tataan perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dengan Negara mitra dagangnya terbentuk?

Tidak ada seorang, lembaga, Negara, atau kekuatan pun yang mampu menjamin bahwa di suatu saat kini dan nanti semua andaian yang mendukung teori ekonomi arus utama saat ini, seperti misalnya pasar bersaing dan informasi sempurna, akan terpenuhi dan berjalan secara alami dan berkesinambungan. Sebelumnya, Brander dan Spencer (1985) dengan teori perdagangan strategis mereka telah menunjukkan bahwa tidak seperti pada pasar bersaing sempurna, subsidi ekspor dapat memberikan manfaat kesejahteraan bersih bagi Negara yang menerapkannya, tetapi merugikan kesejahteraan Negara pesaingnya karena penerimaan beralih dari industri Negara pesaing ke industri dalam negeri Negara yang menerapkan. Boleh jadi inilah

alasan bagi AS dan UE yang tetap mempertahankan bantuan domestic mereka terhadap pertanian sampai saat ini. Dengan demikian, bukankah seharusnya Negara yang berkembang, seperti Indonesia dan atau terbelakang lainnya belajar dari pengalaman mereka itu? Dalam perkembangan geopolitik, kesejagatan, kesaling-tergantungan dan kesaling-pengaruh antar Negara, dan perubahan iklim seyogianya setiap Negara yang terlibat juga mempunyai hak, peran dan kepentingan serta kewajibannya. Oleh karena itu, Indonesia harus menuntut hak, menunjukkan peran dan mengamankan kepentingannya dan tentu melaksanakan kewajibannya untuk merumuskan norma-norma yang dapat disepakati secara internasional. Dalam meniti arus kesejagatan dan liberalisasi tetapi kian restriktif saat ini barangkali Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan perdagangan strategis asalkan mengacu pada rancangan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan industri nasional dan bersikap hati-hati menanggapi gangguan perdagangan di negara lain dalam bentuk kebijakan perdagangan yang kian tidak menentu.

## **PENUTUP**

Suatu bangsa atau wilayah mungkin memiliki perusahaan-perusahaan yang berdaya saing tinggi dalam pengertian ekonomi mikro, tetapi apabila perusahaan-perusahaan terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai-tambah per pekerja yang rendah maka ia tidak akan dapat membuat ekonomi tersebut berdaya-saing dalam pengertian ekonomi makro.

Daya saing wilayah terletak tidak hanya pada daya saing masing-masing perusahaan pendukungnya dan saling keterkaitannya, tetapi juga pada asset yang lebih luas dan sosial, ekonomi, kelembagaan dan sifat publiknya. Sehingga, pengertian daya saing wilayah sama pentingnya antara faktor dan keadaan kualitatif (seperti jejalin pengetahuan informal yang tidak diperdagangkan, kepercayaan, modal sosial, dan sejenisnya) dengan sifat-sifat dan proses kuantitatif (seperti perdagangan antara perusahaan, laju pematenan, pasokan tenaga kerja dan lain-lain). Selain itu, penyebab daya saing umumnya disebabkan oleh pengaruh suatu agregat faktor daripada satu faktor. Sumber daya saing wilayah mungkin juga berasal dari skala geografis yang beragam, dari lokal, ke wilayah, ke nasional dan bahkan internasional. Jadi, kemungkinan mengisolasi pengaruh suatu faktor secara tepat tidak mungkin. Ini berimplikasi pada pengukuran dan analisis daya saing wilayah.

Di dalam aturan permainan sejagat dan kesintasan persebaran pendapatan dan kekayaan yang sangat timpang, Negara-negara terbelakang semakin tertinggal. Sistem sejagat tidak memberi manfaat secara merata. Mengikuti perkembangan akhir-akhir ini, arus kesejagatan ini akan terus berlanjut dan perundingan perdagangan akan terus mengalami kesulitan yang akhirnya mengakibatkan pengelompokan Negara-negara dan perusahaan: Kelompok yang Bertumbuh, Kelompok yang Berkarya, Kelompok yang Mencipta, Kelompok yang Mengkoordinasi. Untuk itu Negara dan Pemerintah Indonesia harus mengikuti perkembangan ini secara aktif agar mampu mengkoordinasikan kebijakan yang mempengaruhi lingkungan bisnis internasional.

Selain itu, pembuat keputusan juga membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat isu perdagangan internasional.

Berbagai jenis perundingan ekonomi dan perdagangan sekarang ini baik di tingkat unilateral, bilateral, regional dan internasional sebetulnya tidak ditujukan untuk mengejar ke arah pengukuhan konsep daya saing suatu Negara, melainkan untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima dalam pengertian semua pihak mendapatkan jawaban yang saling menguntungkan.

Meskipun demikian, ruang kebijakan untuk memanfaatkan jenis-jenis kebijakan dan program yang dahulu diterapkan Negara-negara maju dan Negara-negara Asia Timur yang berkembang pesat, telah dihipit oleh perundingan perdagangan multilateral, tanpa diikuti Negara-negara maju memecahkan masalah-masalah penyebab gangguan perdagangan yang mereka ciptakan. Tampaknya perundingan Putaran Doha sekarang ini juga mengarah untuk semakin menghimpit ruang kebijakan ini, seperti dengan pengangkatan isu Singapura. Oleh karena itu Negara berkembang, termasuk Indonesia harus berjuang sedemikian rupa untuk memulihkan keluwesan kebijakannya dan berusaha memulihkan ruang kebijakannya yang telah terkikis oleh perundingan-perundingan sebelumnya melalui fasilitas-fasilitas yang ada saat ini dan juga dalam isu-isu perundingan lainnya. Terkait dengan hal ini, Indonesia masih mempunyai peluang untuk merundingkan pemulihan kembali atau pengembangan bantuan atau subsidi terhadap litbang, pembangunan wilayah dan perlindungan lingkungannya, karena isu-isu ini semakin relevan saat ini dari sebelumnya, khususnya apabila subsidi-subsidi ini digunakan untuk memperbaiki berbagai gangguan dalam sistem perdagangan sejangat sekarang ini. Untuk itu konsep daya saing bukanlah konsep yang tepat. Yang lebih tepat adalah inovasi teknologi di bidang pertanian. Ini membutuhkan pengembangan sumberdaya alam dan peningkatan mutu sumberdaya insane; dan semua ini membutuhkan modal yang berasal dari pemerintah dan swasta.

Terdapat fakta yang menunjukkan kesintasan kesenjangan antara sejarah kebijakan sewaktu Negara maju berada pada tahap awal pembangunan mereka dulu dengan kenyataan saat ini, di mana mereka juga masih mempertahankan beberapa kebijakan tersebut serta berusaha menekan Negara berkembang untuk membuka pasar mereka, padahal Negara maju sangat dalam mencampuri urusan perdagangan dan industri mereka. Dengan demikian, kajian dan pemikiran ulang beberapa kunci kearifan terdahulu mendesak untuk diperdebatkan dalam kebijakan perdagangan dan lebih luas lagi kesejagatan. Aturan OPD dan kesepakatan perdagangan multilateral harus dirumuskan kembali sedemikian rupa sehingga penggunaan kebijakan pengembangan industri bayi (misalnya tarif dan subsidi) secara aktif tetap dibolehkan.

Asas pengaturan bagi perundingan perdagangan sejangat membutuhkan suatu pemahaman bahwa ekonomi dunia terdiri atas bangsa-bangsa yang berada pada tingkat pembangunan yang jauh berbeda. Negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan untuk mempertahankan, menyesuaikan dan mengembangkan berbagai kebijakan pemerintah yang terbukti mendukung pembangunan di Negara-negara barat dan Negara berkembang yang lain dan bukan semakin memberi predikat tidak berdaya

saing atau berdaya saing rendah bagi Negara berkembang, karena daya saing itu adalah akibat dan bukan sebab dan setiap saat dapat berubah.

Dengan mengizinkan Negara berkembang menerapkan kebijakan (dan kelembagaan) yang lebih cocok dengan tahap pembangunan mereka dan keadaan lain yang mereka hadapi akan memungkinkan mereka untuk berkembang dengan lebih cepat, sebagaimana terjadi pada tahun 1960an dan 1970an. Ini akan menguntungkan tidak hanya Negara berkembang tetapi juga Negara maju dalam jangka panjang, karena peluang perdagangan dan investasi yang tersedia di Negara berkembang meningkat bagi Negara maju.

Untuk menuju kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya inovasi di segala bidang, terutama pertanian yang tidak semata-mata bertumpu pada daya saing, semakin dibutuhkan. Ini dihasilkan dari investasi pada penelitian dan sumberdaya insan termasuk petani. Penelitian ilmiah dapat dipadukan dengan sistem inovasi yang berakar dan mengarah ke petani. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keunggulan pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga merangsang jejaring pasokan pangan yang tanggap dan berkaitan langsung dengan kebutuhan nyata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aiginger, K. 1998. A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries. *Structural Change and Economic Dynamics* pp. 159.188.
- Antimiani, A., P. Conforti and L. Salvatici, 2005. "Alternative scenarios and strategic interactions between developed and developing countries in the agricultural trade negotiations of the Doha Round: A reappraisal", paper presented at the eighth Annual Conference on Global Economic Analysis, Lubeck, Germany, 9-11 June 2005.
- Bandara, J. S. and W. Yu. 2007. Agricultural Trade Liberalization in the Asia-Pacific Region with Specific Reference to Preferential Trade Agreements: Scenario and Impact Analysis. In UN: *Agricultural Trade: Planting the Seeds of Regional Liberalization in Asia. A study by the Asia-Pacific Research and Training Network on Trade*. United Nations, New York - ARTNet. UNESCAP-TIPUB2451.
- Berger, T., and G. Bristow. 2009. Competitiveness and the Benchmarking of Nations - A Critical Reflection." *International Advances in Economic Research* 15: 378-92. doi: 10.1007/s11294-009-9231-x.
- Borozan, D. 2008. Regional Competitiveness: Some Conceptual Issues and Policy Implications. Dalam Barkovic, D. and B. Runzheimer (Eds). *Interdisciplinary Management Research IV*: 50-63. Fourth Interdisciplinary

- Symposium. Porec, Croatia, June 1 -3, 2007. <http://www.efos.unios.hr/wp-content/uploads/sites/27/2013/05/management-IV.pdf#page=50>.
- Bouet, A., J-C. Bureau, Y. Decreux and S. Jean, 2004. "A consistent, ad valorem equivalent measure of applied protection across the world: The MACMap-HS6 database", CEPII Working Paper No. 2004-22, CEPII, Paris.
- Bouet, A., J-C. Bureau, Y. Decreux and S. Jean, 2005. "Multilateral Agricultural Trade Liberalisation: The Contracting Fortress of Developing Countries in the Doha Round", *The World Economy*, 28(9): 1329-1354.
- Brander, J. A. and B. J. Spencer. 1985. Export subsidies and international market share rivalry. *Journal of International Economics* 18(1-2), 83 – 100.
- Cellini, R. and A. Soci. 2002. Pop competitiveness. Banca Nazionale del Lavoro/BNL Quarterly Review 220: 71-101. <http://ojs.uniroma1.it/index.php/PSLQuarterlyReview/article/view/9905/9787>. Diakses Juni 2014.
- Chang, H.-J. 2003. Kicking Away the Ladder: The "Real" History of Free Trade. Foreign Policy In Focus (FPiF) Special Report. <http://www.fpiif.org/papers/03trade/index.html>. Diakses Juni 2014.
- Chang, H.-J. 2009. Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent. *Journal of Peasant Studies* 36 (3): 477-515. <http://dx.doi.org/10.1080/03066150903142741>. Diakses Juni 2014.
- Chang, H.-J. 2014. (Daring). Economics is too important to leave to the experts. The Guardian, Wednesday 30 April 2014. <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/30/economics-experts-economists>. Diakses Juni 2014.
- Dahlman, C. 2008. Innovation Strategies of three of the BRICS: Brazil, India and China-What can we learn from Three Different Approaches? Paper Prepared for Conference Confronting the Challenges of Technology for Development: Experiences of the BRICS. Oxford. [www3.qeh.ox.ac.uk](http://www3.qeh.ox.ac.uk). Diakses Juni 2014.
- de Janvry, A. 2010. Agriculture for development: new paradigm and options for success. *Agricultural Economics* 41 (Issue Supplement s1): 17-36.
- Dhar, B. 2007b. Modelling The Doha Round Outcome: A Critical View. In UN: Agricultural Trade: Planting the Seeds of Regional Liberalization in Asia. A study by the Asia-Pacific Research and Training Network on Trade. United Nations, New York - ARTNet. UNESCAP-IPUB2451.
- Freudenberg, M. 2003. Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment. STI Working Paper Series 2003/16. [https://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/linked\\_docs/Background\\_papers/otherdocs/OECD\\_WP\\_2003\\_16.pdf](https://www.itu.int/osg/spu/ni/wsisbridges/linked_docs/Background_papers/otherdocs/OECD_WP_2003_16.pdf). Diakses Juli 2014.

- Fuglie, K., P. Heisey, J. King and D. Schimmelfennig. 2012. Rising Concentration in Agricultural Input Industries Influences New Farm Technologies. *Amber Waves* 10 (4): 1-6. [www.ers.usda.gov/amberwaves](http://www.ers.usda.gov/amberwaves). Diakses Juli 2014.
- Gallagher, K. P. 2013. *The Clash of Globalizations Essays on the Political Economy of Trade and Development Policy*. Anthem Press.
- Goodwin, N. 2014. Prices and Work in The New Economy. Global Development and Environment Institute Working Paper No. 14-01. Tufts University, Massachusetts. <http://ase.tufts.edu/gdae>. Diakses Juni 2014.
- Grossman, G. M. and E. Helpman. 1994. Endogenous Innovation in the Theory of Growth. *Journal of Economic Perspectives*, Winter: 23-44.
- Harian *KOMPAS* . 2014a. Defisit dan Restriktif. *Harian KOMPAS* Selasa 11 Maret 2014. [http://print.kompas.com/KOMPAS\\_ART00000000000000000005371428](http://print.kompas.com/KOMPAS_ART00000000000000000005371428).
- Harian *KOMPAS* . 2014b. Impor 150.000 Ton Gula Mentah. *Harian KOMPAS* Kamis, 13 Maret 2014. [http://print.kompas.com/KOMPAS\\_ART00000000000000000005412150](http://print.kompas.com/KOMPAS_ART00000000000000000005412150).
- Harian *KOMPAS*. 2014c. Utang Negara: Kreditor "Pemangsa" Menekan Argentina. *Harian KOMPAS* Minggu 4 Agustus 2014, Halaman 5.
- Harris, J. M. 2013. Green Keynesianism: Beyond Standard Growth Paradigms. Global Development and Environment Institute Working Paper No. 13-02. Tufts University, Massachusetts. <http://ase.tufts.edu/gdae>. Diakses Juni 2014.
- Heinemann, J. A., M. Massaro, D. S. Coray, S. Z. Agapito-Tenfen and J. D. Wene. 2014. Sustainability and innovation in staple crop production in the US Midwest. *International Journal of Agricultural Sustainability* 12 (1): 71-88. <http://dx.doi.org/10.1080/14735903.2013.806408> Diakses Juli 2014.
- Helpman, E. 1998. Explaining the Structure of Foreign Trade: Where Do We Stand? *Weltwirtschaftliches Archly* 134(4): 573-589. [www.economics.uni-linz.ac.at](http://www.economics.uni-linz.ac.at). Diakses Agustus 2012.
- Hoff, K. and J. E. Stiglitz. 1999. Modern Economic Theory and Development. This draft: November 5, 1999. This paper was presented at the Northeast Universities Development Conference at Harvard University in October 1999. [siteresources.worldbank.org/DEC/.../hoff-stiglitz-frontiersofdevec.pdf](http://siteresources.worldbank.org/DEC/.../hoff-stiglitz-frontiersofdevec.pdf). Diakses Juni 2014.
- Kitson, M., R. Martin, and P. Tyler. 2004. Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept?. *Regional Studies* 38 (9): 991-999. Diakses Juni 2014.
- Krugman, P. 1994. Competitiveness: A Dangerous Obsession. *Foreign Affairs* 73 (2): 28-44.
- Krugman, P. 1996. Making Sense of the Competitiveness Debate. *Oxford Review of Economic Policy* 12 (3): 17-25.

- Kumar, N. and K. P. Gallagher. 2007. Relevance of 'Policy Space' for Development: Implications for Multilateral Trade Negotiations. RIS Discussion Papers # 120.
- Lall, S. 2001. Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitive Report. *World Development* 29 (9): 1501-1525. biblioteca.fundacionicbc.edu.ar. Diakses Mei 2014.
- Lambooy, J.G.2002. Knowledge and Urban Economic Development: An Evolutionary Perspective. *Urban Studies* 39 (5-6): 1019-1035.
- Martin, R. L. 2004. A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for the European Commission, Directorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics. Diakses Juni 2014.
- Niemann, J. M. 2013. Doing Business in politics - how benchmarking changes global governance: Understanding the techniques behind the creation, distribution and use of the Doing Business indicators that allow the World Bank "to govern at a distance". MSc International Business and Politics. Copenhagen Business School. [http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3689/jesper\\_moll\\_niemann.pdf?sequence=1](http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3689/jesper_moll_niemann.pdf?sequence=1). Diakses Juni 2014.
- Ochel, W. and O. Röhn. 2006. Ranking Of Countries - The WEF, IMD, Fraser and Heritage indices. Research Report. CESifo DICE Report 2/2006. <http://www.cesifo-group.de/ifoHome/publications/docbase/details.html?docId=14567508>. Diakses Juni 2014.
- Oxfam International. 2014. Smallholders at Risk: Monoculture expansion, land, food and livelihoods in Latin America. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org). Diakses Juni 2014.
- Porter, M.1990. The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.
- Reinert, Erik S. 1995."Competitiveness and Its Predecessors — a 500 Year Cross-national Perspective. *Structural Change and Economics Dynamics* 6: 23-42.
- Rostow, V. 1960. The Stages of Economic Growth. Cambridge University Press.
- Schumpeter, J. 1911.Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, Duncker & Humblot, Munich and Leipzig.
- Shadlen, K. 2005. Policy Space for Development in the WTO and Beyond: The Case of Intellectual Property Rights. Global Development and Environment Institute. Working Paper No. 07-01. <http://ase.tufts.edu/gdae/>.

- Shafaeddin, M. 2012. An analysis of how developing countries can attain competitiveness at a high level of development.: Anthem Press. <http://triplecrisis.com/competitiveness-and-development-myth-and-realities/>.
- Stiglitz, J.E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company. New York.
- The Governance Assessment Portal (Daring 2014). "The Global Competitiveness Index." Source Guide to Global Indicators. <http://www.gaportal.org/global-indicators/global-competitiveness-index>. Diakses Juni 2014.
- Timms, B. F. 2008. Development theory and domestic agriculture in the Caribbean: Recurring crises and missed opportunities. *Caribbean Geography* 15 (2): 1001-117. [digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036...ssci...](http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036...ssci...)
- Turner, A. 2014. (Daring). How much can trade really tell us about growth? <http://forumblog.org/2014/07/more-trade-more-growth-delusion/>. Diakses Juli 2014.
- Vukovic, D., A. Jovanovic, M. Dukic. 2012. Defining Competitiveness through the Theories of New Economic Geography and Regional Economy. *J. Geogr. Inst. Cvijic* 62(3): 49-64. [www.gi.sanu.ac.rs](http://www.gi.sanu.ac.rs). Diakses Juli 2014.
- Weis, T. 2004. Restructuring and Redundancy: The Impacts and Illogic of Neoliberal Agricultural Reforms in Jamaica. *Journal of Agricultural Change* 4 (4): 461-491.
- Wise, T. A. and S. Murphy. 2012. *Resolving the Food Crisis: Assessing Global Policy Reforms Since 2007*. Global Development and Environment Institute and Institute for Agriculture and Trade Policy. Tufts University, Massachusetts. [www.ase.tufts.edu](http://www.ase.tufts.edu). Diakses Juni 2014.
- Wise, T. A. 2013a. US opposition to ambitious Indian program a 'direct attack on the right to food'. *Globalization Commentaries*. Global Development and Environment Institute. Tufts University, Massachusetts. [www.ase.tufts.edu](http://www.ase.tufts.edu). Diakses Juni 2014.
- Wise, T. A. 2013b. Right to food wins 'defensive battle' in World Trade Organization deal. *Globalization Commentaries*. Global Development and Environment Institute. Tufts University, Massachusetts. [www.ase.tufts.edu](http://www.ase.tufts.edu). Diakses Juni 2014.
- Wise, T. A. 2014a. Battle Won, The War Goes On. *Globalization Commentaries*. Global Development and Environment Institute. Tufts University, Massachusetts. [www.ase.tufts.edu](http://www.ase.tufts.edu). Diakses Juni 2014.



- Wise, T. A. 2014b. Why it's dangerous to trust corporations to lead the fight against world hunger. *Globalization Commentaries*. Tufts University, Massachusetts. [www.ase.tufts.edu](http://www.ase.tufts.edu). Diakses Juni 2014.
- Wise, T. A. 2007. Policy Space for Mexican Maize: Protecting Agro-biodiversity by Promoting Rural Livelihoods. *Global Development and Environment Institute*. Working Paper No. 07-01. <http://ase.tufts.edu/gdae/>.
- World Bank. 2008. *World development report 2008 - Agriculture for development*. Oxford University Press. New York.
- World Economic Forum/WEF. 2010. *Realizing a New Vision for Agriculture: A roadmap for stakeholders*. The World Economic Forum. Geneva, Switzerland. [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_IP\\_NVA\\_Roadmap\\_Report.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_IP_NVA_Roadmap_Report.pdf). Diakses Februari 2014.
- World Economic Forum/WEF. 2012. *Putting the New Vision for Agriculture into Action: A Transformation Is Happening*. [www3.weforum.org](http://www3.weforum.org). Diakses Juni 2014.
- WTO. 1999. *The Legal Text: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. World Trade Organization. Cambridge University Press.
- WTO. 2013. *World Trade Report 2013: Factors shaping the future of world trade*. World Trade Organization. Geneva. [www.wto.org](http://www.wto.org). Diakses Januari 2014.
- Zhou, J.-M. 2013. *Unblock WTO Doha Round and Conquer Agricultural Protectionism, Under/Over-Production and Neo-Colonialism*. Conference proceedings. 8th International Academic Conference. International Institute of Social and Economic Sciences: September 16-19, 2013. Naples, Italy. <http://www.iises.net/wp-content/uploads/naples-CP-2013.pdf>.